Achmad Mukafi Niam
NU
Membimbing
Umat

NU
MEMBIMBING
UMAT

NU
MEMBIMBING
UMAT

Penyunting:
Achmad Mukafi Niam

Tata Letak:
Nurdin

Desain Cover:
M. Rayhan Fadillah

ISBN: 978-979-16662-6-8

Diterbitkan oleh:
NU Online
Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat 10430
Telp (021) 3914013, fax (021) 3914014

Kata Pengantar

Rais Aam merupakan tokoh paling sentral di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi panduan dalam seluruh kebijakan dan sikap organisasi. Yang menduduki posisi tersebut merupakan orang-orang terpilih dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Panduan dan arahan yang diberikan kemudian dilaksanakan oleh struktur tanfidziyah yang merupakan pelaksana.

KH Ma'ruf Amin terpilih sebagai rais aam dalam struktur kepengurusan PBNU periode 2015-2020 dalam muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015. Beliau juga menjabat sebagai ketua umum MUI. Dengan memangku dua jabatan di dua institusi agama Islam paling strategis di Indonesia, apa yang disampaikannya memiliki dampak luas.

Dengan kondisi kesehatan yang baik, ia bisa berkeliling ke seluruh Indonesia untuk bertemu dengan para pengurus syuriyah untuk menyatukan visi dan menjelaskan tentang gerakan NU. Di sela kegiatan MUI yang juga padat, beliau juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan tokoh-tokoh NU setempat atau menggelar acara NU. Saat pemerintah membutuhkan nasehatnya dalam beragam persoalan keagamaan, dengan ringan ia bertemu dengan para pejabat negara. Kediamannya yang ada di Jakarta memudahkan berbagai aktifitas tersebut.

Satu ungkapan yang selalu diungkapkan olehnya adalah *al-muhafadhah 'alal qadim al-shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah wal ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah.* Ungkapan ini sangat terkenal di lingkungan pesantren bahwa kita harus memelihara yang lama yang masih bagus tetapi mengambil yang baru yang lebih bagus. Secara teks, ungkapan ini bagus, tetapi dalam prakteknya, terdapat kecenderungan untuk tetap berkutat pada nilai lama. Kiai Ma'ruf berusaha menekankan

pentingnya perbaikan dan inovasi secara terus menerus. Apa yang disampaikan sangat pas dengan kondisi kekinian.

Beliau juga kiai yang memiliki perhatian terhadap ekonomi syariah. Cucu Syekh Nawawi Banten ini terlibat secara langsung dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu pendirian bank-bank syariah. Saat *NU Online* sowan, ia sangat bersemangat menyampaikan ide-ide pengembangan ekonomi, terutama ekonomi syariah. Baginya, umat Islam tak boleh terjebak pada wacana-wacana yang silih berganti menguras energi umat. Dan sebagian besar berhenti pada tataran wacana.

Sikap kebangsaannya juga dengan tegas menyatakan bahwa NKRI adalah bentuk final bangsa Indonesia. Dan, umat Islam tinggal mengisi bangunan negara ini dengan nilai-nilai keislaman. Pengalamannya sebagai politisi dari tingkat bawah sampai pusat membuatnya mampu memahami persoalan kenegaraan dengan baik, dan mengambil posisi yang memadukan kepentingan bangsa dan umat Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas dengan baik.

Tulisan-tulisan yang dirangkum dalam buku ini merupakan rangkaian berita atau artikel tentang beliau yang diunggah di *NU Online* selama kurun 2017. Hal ini merupakan upaya untuk memudahkan pembacaan karena tulisan dipilah-pilah dalam kategori tertentu sehingga ada benang merah pikiran yang disampaikan.

Semoga usaha kecil ini bisa menjadi pelajaran dan membawa manfaat yang memacu kita untuk menjadi lebih baik

Jakarta, Desember 2017
Achmad Mukafi Niam

DAFTAR ISI

KH Ma'ruf Amin, Sosok Ahli Fiqih Terampil

Langkah kakinya pendek-pendek. Tatapan matanya sering ke arah depan. Jarang menunduk dan menengadah. Selalu tampak tersenyum. Egaliter dan dialogis. Tak menonjolkan diri sebagai tokoh penting di organisasi massa Islam terbesar negeri ini. Itulah KH Ma'ruf Amin.

Kiai Ma'ruf adalah rais aam PBNU periode 2015-2020 sekaligus ketua umum MUI periode 2015-2020. Dua posisi puncak yang dijabat secara sekaligus ini jarang dimiliki banyak orang. Ulama yang mendapatkan posisi yang sama sebelum Kiai Ma'ruf adalah KH MA Sahal Mahfudh, *rahimahullah.*

Namun, dalam konteks NU, tak seperti para rais aam PBNU sebelum-sebelumnya yang semuanya tinggal di daerah, Kiai Ma'ruf tinggal di jantung ibu kota negara, Jakarta. Karena itu, ia mudah diakses oleh media. Ia bisa diwawancara kapan saja. Terlebih beliau ngantor hampir tiap hari; Senin-Selasa di Kantor MUI, Rabu-Kamis di Kantor PBNU.

Penting diketahui, Kiai Ma'ruf ini bukan tipe kiai yang suka berdiri di belakang sebagai penjaga gawang. Jika diperlukan, beliau tak ragu maju ke depan, memimpin "serangan". Ini karena beliau mengerti arah mata angin. Hampir separuh usianya memang dihabiskan di dunia politik. Pernah menjadi anggota lembaga legislatif, dari tingkat bawah hingga pusat.

Aktivitasnya di ranah politik praktis ini yang menyebabkan sebagian orang lupa bahwa Kiai Ma'ruf adalah seorang ahli fiqih yang terampil. Para pelajar Islam belakangan tampaknya jarang mendengar noktah-noktah pemikiran keislamannya yang brilian. Padahal, hemat penulis, jika mau ditelusuri jejak akademiknya, Kiai Ma'ruf ini memiliki peran

cukup signifikan dalam meletakkan fondasi pembaharuan pemikiran Islam terutama dalam NU.

Dulu ketika NU diserang sebagai organisasi tempat berhimpunnya para *muqallid*, Kiai Ma'ruf bersama para koleganya seperti Kiai Sahal, Gus Dur, Gus Mus, Kiai Maimoen Zubair, Kiai Imron Hamzah, dan Kiai Wahid Zaini membuat sejumlah terobosan penting. Salah satunya adalah dibukanya pintu *istinbath* dan *ilhaq* dalam tubuh NU. Ini sudah dikukuhkan dalam keputusan Munas NU di Lampung, 21-25 Januari 1992.

Saat itu resistensi dari sejumlah kiai bermunculan. Menurut para kiai yang kontra, kerja *istinbath* dan *ilhaq* itu adalah kerja akademik para mujtahid seperti para imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad ibn Hanbal) atau sekurangnya para ulama mazhab setingkat Imam Nawawi dan Imam Rofi'i. Dan menurut mereka, di NU hingga sekarang tak ada kiai yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Karena itu, tawaran *istinbath* dan *ilhaq* itu tak relevan bagi NU.

Penolakan itu terus menggema, dari dulu bahkan hingga sekarang. Tapi tak ada langkah mundur dari Kiai Ma'ruf dkk. Sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian. Hingga pidatonya dalam harlah ke-91 NU kemarin, Kiai Ma'ruf masih menegaskan posisi akademik yang sama, yaitu penampikannya pada tekstualisme dan kejumudan dalam berpikir.

Mengutip Imam al-Qarafi, Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa stagnan pada bunyi-harafiah teks Islam tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan hari ini. Al-Qarafi berkata, *al-jumud 'alal manqulat dhalalun fi al din.* Lebih bermasalah lagi, demikian Kiai Ma'ruf, adalah tekstualisme dalam memahami teks-teks keagamaan seperti dalam kitab kuning.

Sejak awal 90-an hingga sekarang, Kiai Ma'ruf istiqomah berkampanye tentang pentingnya memahami kitab kuning

secara kontekstual, yaitu usaha untuk memahami teks kitab kuning lengkap dengan memahami konteks ketika teks itu disusun oleh pengarangnya.

Tak hanya itu. Seperti umumnya para pembaharu Islam lain, Kiai Ma'ruf pun mengusung ide kemaslahatan. Sebuah adagium yang potensial menghambat pendaratan kemaslahatan dan menahan laju dinamisasi pemikiran Islam secara umum coba dimodifikasi oleh Kiai Ma'ruf. Adagium itu di antaranya berbunyi, *al-muhafadhah 'alal qadim al-shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah* (memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Kaidah ini sesungguhnya menuntut adanya keseimbangan antara merawat tradisi dan upaya inovasi. Namun, dalam implementasinya, bobot merawat tradisi lebih besar sehingga porsi untuk melakukan inovasi pemikiran kurang memadai.

Dari segi substansi, kaidah itu tentu tak bermasalah. Bahkan sangat baik. Namun, menurut Kiai Ma'ruf, kaidah itu perlu dilengkapi. Kiai Ma'ruf menawarkan modifikasi kaidah itu demikian, *al-muhafadhah 'alal qadim al-shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah wal ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah.*

Poinnya, menurut Kiai Ma'ruf, kemaslahatan itu harus selalu ditinjau ulang. Sebab, "boleh jadi sesuatu dipandang maslahat hari ini, dua tiga tahun lagi sudah tidak maslahat lagi," tandas Kiai Ma'ruf. Karena itu, penelusuran pada ditemukannya puncak kemaslahatan adalah kerja akademik yang perlu terus menerus dilakukan.

Tapi, sebagaimana para pemikir Islam lain, Kiai Ma'ruf tak membuka aktivitas *istinbath* pada ranah ibadah. Urusan ibadah, beliau pasrah. Sementara di ranah *mu'amalah* termasuk *siyasah*, Kiai Ma'ruf terus melakukan eksplorasi dan inovasi-inovasi pemikiran. Semoga sehat selalu, Kiai.

KH Abdul Moqsith Ghazali, *wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU.*

KH Ma'ruf Amin dan Gelar Profesornya

Rabu, 24 Mei 2017, KH Ma'ruf Amin mendapatkan gelar profesor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Magribi, Malang. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristek Dikti) Nomor 69195/A2.3/KP/2017, yang menegaskan bahwa KH Ma'ruf Amin diangkat sebagai profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah di UIN Malang.

Sidang senat terbuka itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menristek Dikti Muhammad Natsir, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan lain sebagainya.

Para kiai memang tidak lazim mendapatkan gelar profesor, karena mereka memang tidak begitu memedulikan urusan teknis akademik. Kiai lebih sibuk dengan melayani umat. Walaupun kiai melakukan proses pengembaraan ilmu begitu panjang, tetapi itu dilakukan tanpa predikat dan ijazah formal. Mereka sibuk mengkhatamkan kitab, kalaupun mendapatkan ijazah itu ijazah sanad ilmu, bukan ijazah sebagaimana lazimnya dalam sekolah. Kalau soal ijazah sanad ilmu, itu menjadi perhatian sangat serius bagi kiai. Karena sanad ilmu yang mereka kaji harus sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

KH Ma'ruf Amin termasuk kiai dengan tradisi keilmuan klasik yang sangat mapan. Ia mewarisi etos generasi santri salaf (klasik) yang sibuk dengan mengkaji ilmu Islam yang termaktub dalam kitab kuning. Kajian dalam kitab kuningnya tidak berhenti dalam diskusi dan ngaji, tetapi diaktualisasikan (dan diamalkan) dalam membangun bangsa dan negara. Tak heran kemudian kalau KH Ma'ruf Amin sekarang menduduki posisi tertinggi dalam tradisi keulamaan, rais aam PBNU

dan ketua umum MUI pusat. Dalam tradisi NU, kedudukan rais aam NU bukan amanah biasa, karena selain kedalaman ilmu pengetahuan, juga mempunyai posisi istimewa dalam spiritual.

Gelar profesor, bagi seorang rais aam NU, hanyalah melengkapi kewibawaan semata. Karena posisi rais aam NU sama sekali tidak terkait dengan gelar akademik seorang kiai. Kalaupun perguruan tinggi memberikan gelar akademik, itu tugas perguruan tinggi untuk memberikan penghargaan sekaligus belajar dari tradisi keilmuan para rais aam NU. Tugas negara, melalui perguruan tingginya, untuk memberikan penghargaan itu, karena para kiai sudah menjalankan tridarma perguruan tinggi dengan begitu tulus dan terbukti memberikan kontribusi besar dalam menjaga negara.

Gelar akademik yang disandang para kiai banyak didapatkan tanpa jenjang perkuliahan formal, karena kiai belajar dari pesantren ke pesantren. Pada masa Orde Lama, Bung Karno memberikan apresiasi tinggi kepada para kiai. Para kiai diminta mengajar di berbagai perguruan tinggi, walaupun mereka tidak mengenyam pendidikan formal. Di antara kiai yang mendapatkan gelar profesor adalah KH Anwar Musaddad, KH Saifuddin Zuhri, KH R Moh Adnan, KH Ali Yafi. Gelar profesor yang mereka dapatkan dikarenakan keahlian yang sangat mumpuni dan kiprahnya yang besar bagi bangsa dan negara. Masih banyak kiai dengan kapasitas keilmuan yang lebih tinggi, tetapi tidak mau mendapatkan gelar akademik tersebut.

Semasa Orde Baru, para kiai "tersingkir" dari dunia kampus. Karena tidak mempunyai ijazah formal, kiai dikembalikan ke pesantren masing-masing. Banyak kiai dengan kapasitas ilmu yang tinggi, santrinya juga ribuan, tetapi Orde Baru lebih memilih gelar akademik untuk mengajar di kampus. Setinggi apapun ilmu yang dicapai, karena tidak memenuhi syarat formal ijazah, kiai tidak bisa

mengajar di kampus. Makanya, semasa Orde Baru tidak ada kiai yang mendapatkan gelar kehormatan dalam akademik. Para kiai akhirnya sibuk mendidik santri di pesantren dan melayani umat. Mahasiswa harus datang ke pesantren kalau mau mendapatkan ilmu para kiai. Masa Orde Baru, ilmunya kiai tidak diserap di kampus.

Kiai dan pesantren di masa Orde Baru menjadi kelompok yang termarginalkan, karena kiai dan pesantrennya tidak mau tunduk dalam politik Orde Baru. Orde Baru memangkas gerak langkah kiai dan pesantren, karena disinyalir sebagai bagian dari kekuasaan Orde Lama. Kiai NU dan pesantrennya memang mengalami masa "mesra" bersama Bung Karno, walaupun tetap kritis terhadap kepemimpinan negara. Banyak sekali contoh kritisnya para kiai dengan kebijakan Bung Karno, seperti pembentukan DPR-GR tanpa pemilu, kebijakan terkait PKI, dan kebijakan politik luar negerinya terkait dunia Islam. Tetapi bagaimanapun sikap kritis itu dilancarkan, para kiai selalu teguh menjaga NKRI dari ancaman apapun.

Pada masa Reformasi, ketika peta politik nasional mengalami pergeseran, posisi kiai dalam dunia akademik mendapatkan tempat baru. Tidak sedikit para kiai yang dikenal tinggi kapasitas keilmuannya kemudian mendapatkan gelar kehormatan doktor dan profesor. Di antaranya KH MA Sahal Mahfudh, KH A Mustofa Bisri, KH Ahmad Hasyim Muzadi, KH Sholahuddin Wahid, dan KH Tholhah Hasan. Sedangkan yang mendapatkan gelar professor adalah KH Said Aqil Siroj dan KH Ma'ruf Amin.

Gelar yang diterima KH Ma'ruf Amin dan kiai lainnya adalah adalah bukti bahwa negara kembali hadir memberikan pengakuannya terhadap khazanah keilmuan yang berkembang di pesantren. Pengakuan negara ini sangat penting, bukan untuk kalangan pesantren, tetapi untuk masa depan negara itu sendiri. Karena pesantren sepanjang sejarah negeri ini terbukti memberikan kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa.

Diakui atau tidak diakui negara, pesantren tetap menyelenggarakan pendidikan yang khas, sesuai dengan karakternya. Kalau negara tidak mengakui, yang rugi negara sendiri, karena telah mengabaikan proses belajar anak bangsa. Pesantren juga memberikan beasiswa tidak sedikit kepada santrinya yang tidak mampu, karena biaya sama sekali tidak menjadi acuan dalam belajar di pesantren. Banyak santri yang mengabdi di pesantren, tanpa bekal biaya sepeserpun, mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama dengan lainnya. Para kiai tidak memedulikan anggaran dan bantuan dari negara, karena para kiai hanya fokus mengajar santri atau umat, tanpa peduli dengan urusan gaji.

Dokter Sutomo, salah satu pengagas Budi Utomo, melihat pesantren sebagai perguruan asli milik Nusantara ini. Dalam hal ini, Dokter Sutomo mengatakan.

"Pada zaman nenek saya, yaitu kira-kira pertengahan abad ke-19, pesantrenlah tempat perguruan kita yang asli. Karena belum terdesak oleh sekolah gubermenen, pesantren ribuan jumlahnya. Pengaruh perguruan itu terhadap masyarakat kita, peradaban rakyat, tidak dapat diabaikan. Hubungan antara santri-santri dewasa (istilah sekarang mahasiswa dari universitas; di dalam pondok-pondok yang besar juga diajarkan ilmu lahir dan batin, yang di waktu ini jarang didapati di tanah air kita) erat sekali. Umpamanya, di waktu menanam dan menuai padi, di waktu ada kematian, di waktu bulan puasa, hubungan yang erat itu nyata benar."

Sutomo bahkan mengusulkan pesantren sebagai model pendidikan untuk Indonesia yang akan dilahirkan, walaupun usulannya ditolak. Sutomo memilih pesantren dengan beberapa alasan, yakni dalam dunia pesantren ada hubungan akrab dan intens antara santri dan kiai; lulusannya ternyata mampu masuk dalam dunia lapangan pekerjaan secara merdeka; kehidupan kiai yang sederhana; dan model pendidikannya berjalan dua puluh empat jam. Dokter Sutomo mengatakan.

"Pesantren dan pondoknya mempersatukan anak-anak muda kita dari segala lapisan masyarakat. Anak petani, anak saudagar, anak bangsawan berkumpul di dalam pondok itu. Keadaan lahir dan batinnya mendapat bimbingan yang sama dari guru sehingga pemuda-pemuda itu, yang di kemudian hari memegang pekerjaan yang beraneka warna di dalam masyarakat, merasa satu karena ikatan lahir dan batin yang telah diletakkan, ditanam di dalam pondok dan pesantren itu. Sikap hidup bangsa kita di waktu itu, dari lapisan mana pun, tidaklah terpecah belah, terpisah satu sama lain seperti sekarang."

Gelar profesor yang diterima KH Ma'ruf Amin memang patut diapresiasi. Tetapi, kalangan pesantren harus tetap mengalir sebagaimana aslinya. Jangan sampai gelar-gelar akademik yang didapatkan para kiainya justru menjadikan pesantren keluar dari naluri dan keasliannya. Kalau itu terjadi, gelar profesor yang diterima KH Ma'ruf Amin dan para kiai lainnya justru merusak masa depan keilmuan di pesantren.

Gelar profesor yang diterima KH Ma'ruf Amin dan kiai lainnya juga bukan untuk mematikan daya kritis pesantren. Kalau negara melenceng, para kiai harus kritis terhadap para penyelenggara negara. Justru, para kiai harus berada di atas birokrasi kenegaraan sehingga tetap jernih dalam melihat setiap problem yang terjadi dalam penyelenggaraan negara. Para kiai harus tetap pada khittahnya: melayani umat, menjaga negara, dan teguh mengangkat harkat dan martabat bangsa.

*) Santri di Masjid Zahrotun Wonocatur Banguntapan Bantul

KEBANGSAAN

Kiai Ma’ruf: Islam Bersatu Bela Palestina

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin mengatakan, saat ini umat Islam sangat tersakiti keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Hari ini kita benar-benar tersakiti dengan ucapan Donald Trump,” kata Kiai Ma’ruf dalam *Aksi Bela Palestina* di Area Monas Jakarta, Ahad (17/12).

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menyerukan kepada dunia agar Trump mencabut keputusan sepihaknya tersebut. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yerusalem adalah ibukota Palestina, bukan Israel.

“Islam bersatu bela Palestina. Indonesia bersatu bela Palestina,” ujar Kiai Ma’ruf.

Sampai hari ini, imbuh Kiai Ma’ruf, Donald Trump tidak bergeming dan menghiraukan berbagai penolakan atas keputusannya itu. Apakah Donald Trump tidak mendengar atau sudah tidak bisa mendengar berbagai penolakan keputusannya itu di berbagai belahan dunia.

“Jangan-jangan Donald Trump sudah *summun, bukmun, umyun* (tuli, buta, dan bisu),” ucapnya disambut riuh peserta aksi.

Ia menyerukan untuk memboikot Amerika Serikat apabila Donald tidak lekas mencabut keputusannya tersebut.

“Kalau Donald Trump tidak mau mencabut (keputusannya), boikot Amerika,” seru Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf menambahkan, bangsa dan umat Islam Indonesia wajib mendukung Palestina agar mendapatkan

hak-haknya sebagaimana bangsa lainnya. Sejak dulu, Indonesia selalu menentang segala bentuk penjajahan dan memelopori kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah.

"Kita bebaskan Palestina," tukasnya. **(Muchlishon Rochmat)**

Kiai Ma'ruf Jelaskan Langkah Sikapi Perbedaan dan Penyimpangan

Walaupun memiliki manfaat yang sangat besar dari sisi komunikasi dan informasi, perkembangan media sosial dan konten-konten yang ada di dalamnya menimbulkan kegaduhan seperti hoaks, fitnah dan ujaran kebencian. Hal ini mendasari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Demikian dijelaskan Ketua Umum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin pada *Silaturahmi Nasional I Stakeholders Konten Keislaman* di Hotel Santika TMII Jakarta, Jumat (8/12).

Kiai yang juga rais aam PBNU ini mengingatkan agar dalam dalam bermedia sosial senantiasa dapat melakukan seleksi ketat terhadap konten yang ada.

"Jangankan yang bohong, yang benar pun kalau diungkap akan menimbulkan ketidakbaikan, itu tidak boleh. Peristiwanya benar, tapi bisa menimbulkan kegaduhan juga tidak boleh," kata Kiai Ma'ruf.

Apalagi saat ini berbagai macam media baik cetak maupun elektronik banyak bermunculan yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan melalui konten-konten yang variatif.

Dalam hal penerbitan buku, Kiai Ma'ruf melihat bahwa masih banyak buku-buku yang menyimpang, baik dari sisi agama maupun pemahaman kebangsaan dan kenegaraan.

Upaya MUI membuat Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) merupakan ikhtiar meneliti konten dan memberikan sertifikasi kepada buku yang baik. LPBKI MUI akan men-

tashih buku-buku dan konten keislaman apakah terdapat penyimpangan atau tidak.

"Kalau perbedaan ditolerir tapi kalau penyimpangan tidak ada toleransi," tegasnya.

Terkait dengan komitmen kebangsaan, Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa Indonesia bisa damai dan rukun di tengah kemajemukan yang ada karena ada keinginan untuk bersatu dan memiliki kesepakatan serta bisa menjaga kesepakatan tersebut.

"Banyak orang yang punya kesepakatan tapi tidak bisa menjaganya. Di tengah jalan bubar," jelasnya tentang kesepakatan bangsa Indonesia berupa Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45.

Bangsa Indonesia harus mempertahankan kesepakatan yang telah ada ini untuk terus mempertahankan kesejukan yang sudah dapat dinikmati saat ini. **(Muhammad Faizin/ Kendi Setiawan)**

Cetak Dai Internasional, MUI Bentuk Akademi Dakwah

Halaqah Dakwah Nasional 2017 bertema *Menjawab Tantangan Dakwah di Era Modern* yang dilaksanakan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menghasilkan program strategis pembentukan Akademi Dakwah.

Ketua Umum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin saat pembukaan kegiatan tersebut mengemukakan bahwa Akademi Dakwah yang akan dibentuk tersebut merupakan lembaga pendidikan bagi para dai atau penceramah dengan durasi waktu dua sampai dengan tiga bulan berbasis peta dan pedoman dakwah.

Akademi tersebut dibentuk dalam rangka memperbaiki kegiatan dakwah secara menyeluruh baik pada dai, *mad'u, maddah, manhaj,* maupun *wasilah* dakwah.

Dengan hal tersebut harapnya proses dakwah semakin berkualitas dan mencerdaskan umat serta membawa umat kepada jalan kebaikan dan ketakwaan.

"Akademi Dakwah yang sedang dibentuk ini nantinya akan mendidik para dai (penceramah) Indonesia agar berstandar Internasional," ungkap Rais Aam PBNU ini di hotel Rivoli Jakarta, Senin (13/11).

Kiai Ma'ruf menjelaskan juga bahwa dakwah harus memerankan fungsi *tauhidul ummah* (mempersatukan umat), *tansiqul harakah* (mensinkronkan gerakan dakwah), *taswiyatul manhaj* (menyamakan persepsi pola keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah), dan *himayatul ummah* (melindungi umat) dari akidah dan pemikiran sesat.

Dakwah juga harus mampu melindungi umat dari muamalat yang haram dan konsumsi yang haram, termasuk

membentengi umat Islam menghadapi rongrongan dari luar seperti upaya pemurtadan.

Halaqah yang dilaksanakan mulai Senin (13/11) sampai dengan Rabu (15/11) ini diikuti oleh peserta dari utusan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI tingkat provinsi se-Indonesia. **(Muhammad Faizin/Abdullah Alawi)**

MUI: Menjaga Keutuhan NKRI adalah Kewajiban

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menjelaskan, Indonesia adalah negara kesepakatan bersama. Semua kelompok masyarakat baik yang Muslim maupun yang non-Muslim berjanji untuk saling menjaga, mencintai, dan menyayangi.

"Dan berjanji untuk saling membantu dan menolong (satu sama lainnya)," kata Kiai Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara *Halaqah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI* di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Kamis (12/10) malam.

Mengutip teori Al-Ghazali, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menuturkan bahwa sebuah negara terbentuk karena adanya sebuah ketergantungan atau inderdependensi antarsatu elemen masyarakat dengan yang lainnya. Misalkan seorang petani membutuhkan alat-alat pertanian, maka diperlukanlah industri pertanian. Untuk mengangkut hasil panen, mereka membutuhkan alat transportasi sehingga mereka memerlukan industri transportasi.

"Jika keamanannya terganggu, maka perlu tentara. Karena saling tergantung maka kita membentuk negara. Ini teori Imam Ghazali yang sudah ada seribu tahun tahun yang lalu," jelas penerima gelar profesor dari UIN Malik Ibrahim Malang itu.

Menurut dia, tujuan pendirian sebuah negara tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercetus dalam kaidah hukum Islam bahwa apapun yang diperbuat oleh seorang pemimpin itu harus bermuara pada kemaslahatan rakyatnya.

"Kemaslahatan yang lahir tidak boleh bertentangan dengan kebangsaan dan keislaman. Pun tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Kalau ada kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash*, itu bukan maslahat yang hakiki tetapi dugaan saja," terangnya.

Oleh sebab itu, dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka seluruh masyarakat Indonesia harus bersyukur karena urusan dasar negara sudang diselesaikan oleh para pendiri bangsa ini.

"Meski sudah final (dasar negara Indonesia), tetapi ada kelompok yang belum memiliki komitmen penuh terhadap kebangsaan kita," katanya.

Maka dari itu, ia menghimbau kepada seluruh pengurus MUI khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya untuk mengawal dan menjaga kesatuan NKRI.

"Kita memiliki kewajiban untuk mengawal hubungan yang baik antara Islam dan kebangsaan," tegasnya.

"Ini tugas kita menjaga NKRI," tutupnya. (**Muchlishon Rochmat/Alhafiz K**)

Radikalisme dan Intoleran Jadi Sumber Kegaduhan Ideologi Negara

Nahdlatul Ulama adalah *jamiyyah diniyah islamiyah* (organisasi keagamaan Islam) yang tanggung jawabnya semakin hari semakin besar. Tanggung jawab ini meliputi banyak hal di antaranya adalah *masuliyyah diniyah* (permasalahan agama), *mas'uliyah umatiyah* (permasalahan umat), dan *mas'uliyyah wathaniyah* (permasalahan kebangsaan dan kenegaraan).

Hal ini diingatkan Rais Aam PBNU KH. Ma'ruf Amin saat memberikan tausiyah kebangsaan pada pada pembukaan kegiatan pra-Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandarlampung, Sabtu (4/11).

Kiai Ma'ruf menilai kegaduhan permasalahan kebangsaan saat ini dengan mempermasalahkan ideologi negara yang sudah ada disebabkan oleh kelompok radikal dan intoleran yang ingin merubah negara ini dengan cara kekerasan.

Kelompok ini lanjutnya tidak mentolelir kelompok lain yang tidak sama dengan kelompoknya. "Hanya kelompoknya saja yang benar. Jangankan non-Muslim, sesama Islam saja dinyatakan sesat bahkan kafir. Kelompok ini dinamakan kelompok takfiri suka mengkafirkan orang lain. Ini berbahaya sekali," jelasnya.

Tanggung jawab NU sebagai sebuah jamiyah juga ditegaskan oleh Ketua Pusat Munas dan Konbes Robikin Emhas yang juga hadir pada acara tersebut. Ia menegaskan bahwa permasalahan agama, umat dan bangsa menjadi agenda utama jelang satu abad Nahdlatul Ulama pada 2026.

“Nahdlatul Ulama tidak ada agenda politik praktis. Politik NU adalah politik kebangsaan ikut serta dalam memecahkan permasalahan keumatan,” tegasnya.

Oleh karenanya dalam munas dan konbes yang akan dilaksanakan di Lombok NTB pada 23 sampai dengan 26 November mendatang, NU akan membahas agenda Penguatan Organisasi Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama, dan Reforma Agraria untuk Pemerataan Kesejahteraan Warga.

“Dalam Munas juga akan dilaksanakan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah (Pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu’iyyah (Pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah (Pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan),” katanya. **(Muhammad Faizin/Kendi Setiawan).**

Kiai Ma'ruf Puji Paduan Nilai Budaya dan Agama Pernikahan Kahiyang dan Bobby

Rais Aam PBNU yang juga Ketum MUI KH Ma'ruf Amin memuji acara mantu Presiden Jokowi yang memadukan nilai-nilai budaya adat jawa dan nilai-nilai agama Islam. Pada kesempatan tersebut Kiai Ma'ruf bersama Wapres Jusuf Kalla dipercaya menjadi saksi ijab qabul pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution di Gedung Graha Saba Buana Solo, Rabu (8/11).

"Acaranya luar biasa ada nuansa keagamaan Qur'an, nasehat pernikahan, doa dan ada juga budayanya. Acaranya luar biasa perpaduan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya," katanya saat diwawancarai salah satu stasiun televisi di sela-sela resepsi.

Selaku saksi, Kiai Ma'ruf menilai proses ijab qabul dapat berjalan dengan baik dan lancar. Presiden Jokowi dan mempelai putera Bobby Nasution mengucapkan kalimat-kalimat ijab qabul dengan baik.

"Beliau (Presiden) lancar sekali menyampaikan kalimat ijab qabul. Tegas, gamblang, walaupun baru kali ini. Tidak ada keragu-raguan," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf juga mengapresiasi acara mantu tersebut karena Presiden mengundang para ulama dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Yang hadir meliputi semua lapisan masyarakat. Ulama, menteri, pejabat, gubernur, masyarakat biasa, bahkan kiai-kiai dari daerah datang semua. Dari Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Sulawesi dari mana-mana," terang Kiai Ma'ruf didampingi Ketum MUI Lampung KH Khairuddin Tahmid.

Sementara itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj

saat menyampaikan khutbah nikah pada ijab qabul tersebut juga sempat menyampaikan penjelasan terkait pernikahan dan kebudayaan.

“Pernikahan adalah ibadah. Setiap ibadah harus sesuai dengan syariat Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Akad nikahnya merupakan syariat dan selebihnya adalah budaya yang kita lestarikan yang merupakan bagian dari Islam Nusantara,” katanya.

Perjodohan yang terjadi diantara dua insan manusia menurutnya juga bukan hanya pertemuan fisik semata. Namun yang lebih penting dari itu, pernikahan adalah pertemuan akhlak, budaya, peradaban, martabat dan kepribadian.

“Mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang bermartabat, berguna bagu agama, bangsa dan negara,” ujar Kiai Said menjelaskan tafsir surat Ar Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang hal tersebut. **(Muhammad Faizin/Kendi Setiawan).**

Kiai Ma'ruf Amin Apresiasi Sikap Harmoni Jokowi dan Ulama

Pengasuh Pesantren An-Nawawi Tanara KH Ma'ruf Amin menyatakan terima kasih atas kesediaan pemerintah RI yang hadir pada peringatan Haul Ke-124 Syekh Nawawi Banten di Pesantren An-Nawawi Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Jumat (21/7) malam. Kiai Ma'ruf menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden RI dan tamu undangan lainnya.

"Kita bersyukur punya Presiden yang mencintai ulama sehingga presiden keliling terus ke pesantren-pesantren," ujar Kiai Ma'ruf dalam sambutannya.

Menurutnya, kaitan umara dan ulama merupakan hubungan ideal. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Hubungan keduanya harus berlangsung harmonis. Hal ini tidak terjadi di sebagian wilayah Timur Tengah.

Syekh Nawawi, menurut cicitnya itu, merupakan Ulama Nusantara yang lahir di Tanara, Kabupaten Serang, Banten, yang karya-karyanya mendunia. "Sampai saat ini kitab-kitab beliau dikaji di berbagai pesantren dan universitas di berbagai negara di dunia," kata Kiai Ma'ruf.

Pada haul Syekh Nawawi tahun ini, Presiden RI Joko Widodo hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja II. tampak hadir Menteri Agama H Lukman Hakim, Menteri BUMN Rini Suwandi W, Menteri PU Budi Karya, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota Bandung Ridwan Kamil. Mereka mengapresiasi kegiatan tersebut. (**Abdul Malik Mughni/Alhafiz K**)

KH Ma'ruf Amin Minta Masyarakat Tidak Menggelar Aksi 299

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Ma'ruf Amin meminta sejumlah elemen masyarakat untuk tidak menggelar aksi "299" yang mengusung tema menolak PKI dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Sebenarnya (demo) itu tidak perlu lagi," kata Kiai Ma'ruf di Jakarta, Rabu (27/9).

Rais Aam PBNU ini mengatakan, seharusnya masyarakat mempercayakan kepada mekanisme yang telah berjalan terkait dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas itu.

Terkait tuntutan penolakan terhadap keberadaan PKI, Amin menuturkan pengikut paham komunis itu sudah tidak muncul di Indonesia.

Jika ditemukan orang yang terlibat PKI, Kiai Ma'ruf meminta masyarakat melaporkan hal itu kepada aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

"Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama mengantisipasi agar paham itu tidak hidup kembali," tuturnya.

Dia mengimbau elemen masyarakat yang tidak puas dengan Perppu Ormas bisa menempuh proses hukum yang berlaku dengan cara menguji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dengan TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengamankan aksi "299" menuntut Tolak Perppu Ormas dan keberadaan PKI pada Jumat (29/9) besok.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyebutkan massa aksi 299 akan mengerahkan sekitar 15.000 orang yang dipusatkan di Gedung DPR RI.

Argo menambahkan Polda Metro Jaya bersama pihak terkait akan mengerahkan sekitar 18.000 personil guna mengamankan aksi tersebut.

Argo mengimbau peserta aksi menjaga keamanan dan ketertiban umum saat menyampaikan pendapat di muka umum. **(Antara/Fathoni)**

Kiai Ma’ruf: Amputasi Intoleransi

Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin mengungkapkan Indonesia adalah negara berdasarkan kesepakatan. Ada sebuah interdependensi, juga ada banyak perbedaan pendapat. Hal itu tidak menjadi masalah, namun yang menjadi masalah adalah adalah *judgment* personal tentang pengkafiran.

“Karena itu kita harus hapus, amputasi intoleransi, itu harus dihilangkan,” kata Kiai Ma’ruf Amin dalam seminar nasional *Menakar Kepentingan Ukhuwah Islamiyah dengan Kepentingan Bangsa* di STAI Al Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah, Senin (25/09).

Amputasi dan penghapusan, lanjut Kiai Ma’ruf juga harus dilakukan terhadap cara berpikir yang mengarah kepada intoleransi, seperti dilakukan para tekstualis.

“Toleransi harus dibangun. Indonesia telah melewati berbagai beda pendapat sebelum merdeka yang hasil finalnya Pancasila sebagai dasar negara,” ujarnya.

Menurut Kiai Ma’ruf Islam, ada tiga masalah krusial terkait kehidupan masyarakat Indonesia, yakni keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ketiganya harus saling bersinergi, agar Indonesia menjadi bangsa yang utuh dan toleran, karena intoleransi disebabkan salah tafsir mengenai keislaman, kebangsan, dan kemanusiaan.

“Jika ketiga poin di atas tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi benturan, berarti akan menimbulkan perpecahan NKRI,” tegasnya.

“Urusan Islam, kebangsaan, dan kemanusian itu harusnya saling menguatkan dan menjaga,” tambahnya.

Karena itu, Kiai Ma’ruf mengaku bangga dengan adanya perguruan tinggi berbasis pesantren seperti STAI Al Anwar.

“STAI Al Anwar menjadi tempat yang dapat menyiapkan generasi lanjut sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti bagaimana perpaduan antara keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan,” pungkasnya. **(Aji Pangestu/Kendi Setiawan)**

KH Ma'ruf Amin Klarifikasi Pemberitaan soal Pembekuan Masjid di Bogor

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Umum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa jika sebuah masjid digunakan untuk menyebarkan ajaran kebencian, menyesat-sesatkan, bahkan mengafirkan harus dihentikan karena membuat kegaduhan di masyarakat.

Penjelasan tersebut dia katakan ketika pernyataan dirinya dipelintir di sejumlah media bahwa masyarakat yang melakukan aksi untuk mendorong pembekuan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) Kota Bogor, Jawa Barat merupakan kelompok intoleran.

"Saya tidak tahu di mana saya ngomong. Saya tidak paham itu ada kaitannya dengan MIAH di Bogor," ujar Kiai Ma'ruf, Selasa (19/9) saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung PBNU Jakarta.

Pernyataan tersebut Kiai Ma'ruf kemukakan usai menerima kunjungan Ketua PCNU Kota Bogor Ifan Haryanto dan Ketua MUI Kota Bogor KH Mustofa Abdullah bin Nuh di ruang kerjanya.

Menurut Kiai Ma'ruf pendapat-pendapat dia secara umum, jika tempat ibadah sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, itu prosesnya sudah betul, tapi tidak ada kaitannya dengan persoalan masjid di Kota Bogor.

"Tapi jika pernyataan saya dikaitkan dengan Bogor, saya sama sekali tidak pernah ngomong urusan Bogor itu," tegas Guru Besar di bidang Ekonomi Syariah ini.

Dia menerangkan, ketika dirinya mengetahui tentang persoalan pembekuan MIAH Kota Bogor, justru mereka itu

adalah kelompok yang tidak toleran, karena sering mencaci, sering menyalahkan bahkan sering mengafirkan pihak lain.

“Berarti kelompok itulah yang tidak toleran. Sebab itu saya tidak pernah mengatakan bahwa kelompok yang mendemo mereka itu intoleran,” terang Kiai Ma’ruf.

Menurutnya, jika kelompok yang ada di dalam MIAH tersebut menebarkan ajaran kebencian yang meresahkan masyarakat, maka mereka layak dihentikan.

“Kalau sudah seperti itu memang harus dihentikan karena membuat kegaduhan,” tegas Kiai Ma’ruf. **(Fathoni)**

Kunjungi Manado, Rais Aam PBNU: Ini Kota Toleransi di Indonesia

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menyambangi ujung utara Indonesia, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (17/8). Kunjungannya ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi dengan para ulama, pengurus wilayah NU Sulawesi Utara, dan tokoh lintas agama.

Menurut Kiai Ma'ruf Amin, Kota Manado dipilih kali ini lantaran kota tersebut dikenal dengan kehidupan toleransi beragamanya sehingga masyarakatnya bisa hidup berdampingan.

"Kita harus terus mengampanyekan bahwa semua agama mengajarkan kedamaian. Makanya PBNU berinisiatif untuk bertatap muka dengan para ulama dan tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan pejabat daerah setempat," jelasnya, Kamis (17/8).

Ia menambahkan, kunjungan itu diadakan guna meminta masukan, bertukar pikiran dengan para tokoh mengenai perkembangan isu-isu keagamaan yang cenderung dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat.

Momentum Hari Kemerdekaan Ke-72 ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan toleransi dan perdamaian kepada seluruh elemen bangsa. Rasa toleransi antarsesama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan kepada Indonesia berupa kemerdekaan.

"Tanpa kebersamaan masyarakat, rasanya sulit kita sebagai sebuah bangsa mampu menghadapi segala macam tantangan. Kita jangan sampai tercerai-berai dan harus tetap utuh," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tersebut.

Selain menghadiri halaqah tokoh lintas agama, Kiai Ma'ruf akan memberikan kuliah umum seputar ekonomi syariah di auditorium Universitas Sam Ratulangi.

Kegiatan halaqah tokoh lintas agama ini mendapat apresiasi dari Koordinator Jaringan Gusdurian Sulawesi, Suaib Amin Prawono. Menurutnya, aksi seperti sangatlah tepat di tengah situasi bangsa yang sempat diwarnai konflik bernuansa SARA, pertarungan ideologi bahkan aksi terorisme.

"Halaqah lintas agama yang dilakukan sangat tepat," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Suaib menuturkan perlu ada tokoh sentral yang konsisten menyuarakan semangat toleransi dan perdamaian setelah wafat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dinobatkan sebagai tokoh pluralisme.

Selama ini, ia mengaku terus mengikuti sepak terjang Kiai Ma'ruf yang mengunjungi daerah-daerah di Indonesia. Dalam setiap kunjungannya, Kiai Ma'ruf selalu mengusung isu-isu toleransi, keberagaman, perdamaian.

"Menurut saya KH Ma'ruf layak dinobatkan sebagai tokoh perdamaian," tegas Suaib yang sekarang sedang melakukan riset mengenai sistem pendidikan keagamaan di Kota Manado.

Ia mencontohkan, ketika eskalasi politik Pilkada DKI Jakarta memanas, sosok Kiai Ma'ruf mampu menjadi penengah dua kelompok yang berbeda pandangan. Ditambah lagi Kiai Ma'ruf pernah memberikan perlindungan kepada warga etnis Tionghoa yang menjadi korban Tragedi Mei 1998. Rumahnya di kawasan Koja Jakarta Utara dijadikan penampungan. (**Red Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf: Kelompok Intoleran dan Takfiri Bahayakan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan, tugas utama santri adalah mendalami ilmu agama. Sementara tugas pesantren ialah menyiapkan orang yang memahami agama. Di samping itu, pesantren juga harus menyiapkan orang sesuai dengan tuntutan zaman.

"Jadi, kalau dulu itu, selain menjadi ulama yang pandai, maka yang digembleng adalah menjadi mujahid, pejuang-pejuang karena tantangannya adalah bagaimana memerdekakan bangsa ini dari penjajah," kata Kiai Ma'ruf Amin pada acara peluncuran dan konferensi pers Hari Santri 2017 di lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Sementara hari ini, katanya, selain menguasai ilmu agama Islam, santri juga harus menjaga negara yang telah dianggap final ini daripada upaya-upaya kelompok radikal, intoleran, dan takfiri yang ingin merusak dan mengganti tatanan yang ada. Kelompok-kelompok seperti ini dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

"Oleh karena itu, adanya kelompok intoleran sangat berbahaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tugas utama (santri) selain menguasai agama," katanya. (**Husni Sahal/Alhafiz K**)

Mengetuk Pintu Langit dari Istana Negara

Rais Aam Nahdlatul Ulama, KH Ma'ruf Amin mengapresiasi dzikir kebangsaan yang dihelat di halaman Istana Negara Jakarta. Dzikir bersama ini dimaksudkan untuk mensyukuri berbagai nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia.

"Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat kemerdekaan," kata Kiai Ma'ruf, Selasa (1/8) malam.

Bangsa Indonesia, lanjutnya, juga patut bersyukur karena dianugerahi tanah air yang subur dan makmur, serta memiliki dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa, yaitu Pancasila.

Dewan Penasihat Majelis Dzikir Hubbul Wathan ini menjelaskan, dengan menggelar dzikir bersama maka kita berharap mendapatkan *Himayah, Wiqoyah*, dan *Ri'ayah*. *Himayah* yang dimaksud adalah agar Indonesia dilindungi dari berbagai malapetaka dan dijaga dari berbagai hal yang dapat merusak bangsa. *Ri'ayah* diartikan agar negara ini tetap utuh, aman dan sejahtera.

Disamping itu, malam dzikir ini juga dimaksudkan untuk memohon *inayah*, yaitu pertolongan dari Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri maupun global yang banyak mempengaruhi berbagai negara di dunia ini.

Ia menegaskan, upaya-upaya lahiriah saja tidak cukup. Kita memerlukan *inayah* berupa berkah dan rahmat dari Allah. Sebab, Rasulullah pernah bersabda bahwa, kamu tidak akan masuk surga karena amalmu semata. Apa engkau juga tidak ya Rasulullah? Saya juga tidak. Lalu dengan apa? Yaitu dengan apa yang Allah siramkan dari rahmatnya kepada kamu.

Dengan pesan ini, Kiai Ma'ruf mengingatkan bahwa kemerdekaan dan segala kemajuan yang didapat negara ini bukan hanya karena perjuangan seluruh rakyatnya saja. Kemerdekaan ini juga didapat karena rahmat dari Allah. Untuk itu kita mengetuk pintu langit untuk memohon berkah agar bangsa ini tetap sejahtera, aman dan damai. Mewujudkan negara *baldatun thoibatun wa rabbul ghofur.*

"Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan apa yang kita inginkan," harapnya. **(Zunus)**

Jokowi: Syekh Nawawi Ulama Indonesia yang Dihormati Dunia

Presiden Joko Widodo turut menghadiri peringatan Haul ke-124 Syekh Nawawi Al-Bantani, Jumat (21/7) malam di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Syekh Nawawi salah satu ulama Nusantara yang keilmuannya diakui dunia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan kebahagiaannya bisa menghadiri Haul Syekh Nawawi. "Syekh Nawawi adalah ulama indonesia yang dihormati oleh dunia. Bahkan, beliau satu-satunya ulama yang dimakamkan di samping makam istri Rasulullah," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dalam berbagai pertemuan dengan sejumlah kepala negara di dunia, ia mengaku selalu menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai 714 suku, 17 ribu pulau, dengan ratusan bahasa tapi bisa menyatu.

Menurutnya, inilah kekayaan Indonesia yang tak dimiliki negara lain. Hal ini harus dirawat bersama. Keberagaman ini merupakan fitrah dan anugerah Allah yang harus dijaga, jangan dipertentangkan, jangan dibuat bergesekan.

Presiden juga mengaku, dalam berbagai konferensi di dunia, ia kerap menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia.

"Kita memiliki hampir 220 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Ini akan saya sampaikan terus agar dunia tahu, bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk Muslim terbesar," tambahnya.

Presiden juga berharap, umat Islam Indonesia bisa meneladani perjuangan dan keulamaan Syekh Nawawi yang mampu membangkitkan Indonesia melalui jalur pendidikan

Sementara Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden RI dan tamu undangan lainnya.

"Kita bersyukur punya Presiden yang mencintai ulama. Sehingga Presiden keliling terus ke pesantren-pesantren," ujar Kiai Ma'ruf dalam sambutannya.

Syekh Nawawi menurut cicitnya itu, merupakan Ulama Nusantara yang lahir di Tanara, Kabupaten Serang, Banten, yang karya-karyanya mendunia.

"Sampai saat ini kitab-kitab beliau dikaji di berbagai pesantren dan universitas di berbagai negara di dunia," ujarnya. **(Red: Fathoni)**

Rais Aam PBNU: Berjuanglah untuk Islam secara Konstitusional dan Demokratis

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan tanggung jawab ulama dalam himayatu daulah atau menjaga NKRI dari rongrongan kelompok radikal.

"Ulama bertanggung jawab menjaga umat dan melayani umat. Ulama juga bertanggung jawab dalam menjaga negeri ini. Karena ulama juga turut berperan dalam mendirikan NKRI, maka wajib hukumnya ulama menjaga keutuhan NKRI," kata Kiai Ma'ruf dalam Halaqah Alim Ulama dan Kiai Pesantren se Wilayah III Cirebon, Sabtu (6/5/2017) di Pondok Pesantren Gedongan, Cirebon.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, ada kelompok yang ingin memperjuangkan Islam, tanpa memperhatikan realitas kebangsaan dan memaksakan kehendak. Ada juga kelompok yang melakukan delegitimasi agama.

"Dua kubu ini sekarang menguat. NU yang cara berpikirnya moderat, harus bisa melunakkan, mengendalikan dua kubu ini. Kita harus mencegah gejala-gejala yang bisa menimbulkan konflik ini," tandasnya.

Ia mengimbau agar para kiai lebih peka dalam mendidik umat dan memperjuangkan kemaslahatan umat Islam, ulama harus memperhatikan konstitusi, kebinekaan, dan toleransi. "Kita bukan tidak berjuang untuk Islam, kita berjuang dengan cara konstitusional dan demokratis," imbuhnya.

Pelayanan terhadap umat, kata Kiai Ma'ruf, juga dilakukan dalam bentuk menjaga kerukunan umat. "Berikutnya kita perlu melakukan islahul umat dan khidmatul umat (perbaikan dan pengahbdian kepada umat). Kita melakukan perbaikan-perbaikan. Sekarang ini adalah momentum yang sangat baik. Baru-baru ini kita mengadakan kongres ekonomi umat. Kita

gerakkan ekonomi umat. Mendorong umat untuk mandiri. Bila perlu berkontribusi kepada bangsa," paparnya.

Hal senada diungkap Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar. Khidmah kiai NU terhadap umat, menurutnya, telah dilakukan dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Dalam kondisi situasi bangsa yang sedang mengalami pancaroba ini, kita perlu mengingat kembali manqobah dan uswah atau teladan yang diajarkan para ulama lampau. Saat ini kita harus mulai mengoreksi diri menjelang satu abad NU ini, apa yang bisa kita sumbangkan untuk NU dan bangsa ini," ungkapnya.

Halaqah yang dihadiri ratusan ulama se Wilayah III Cirebon itu juga menghasilkan sejumlah usulan strategis untuk memaksimalkan sinergi gerakan Jamiyah Nahdlatul Ulama. (Malik Mughni/Mahbib)

Kiai Ma'ruf Amin: Beda Pendapat, Tidak Perlu Saling Bermusuhan

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin (Kiai Ma'ruf) mengatakan, seharusnya umat Islam itu tidak saling bermusuhan antara satu dan yang lainnya hanya karena perbedaan pendapat. Ia juga meminta kepada umat Islam untuk terus menjaga dan meningkatkan persaudaraan keislaman (*ukhuwah islamiyah*).

"Jangan terkoyak oleh masalah-masalah yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi permusuhan," kata Kiai Ma'ruf kepada *NU Online* di Lantai 4 Gedung PBNU, Senin (3/4).

Seharusnya, jelas Kiai Ma'ruf, antarsesama umat Islam itu harus saling menasihati dan mengajak ke jalan yang benar. Baginya, kalau seandainya mereka yang dinasihati dan diajak untuk berbuat baik menolak, maka itu jangan dijadikan sebagai bahan untuk menyulut api permusuhan.

"Dengan orang non-Muslim pun kita masing-masing saja. *Lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku)," jelasnya.

Kiai Ma'ruf menjelaskan, perbedaan-perbedaan tersebut jangan menjadi alat untuk saling bermusuhan. Untuk itu, Kiai alumni Pesantren Tebuireng ini meminta umat Islam Indonesia untuk tidak menanamkan sikap saling benci dan saling memusuhi antarsesama.

"Kita harus membangun (sikap) saling mencintai dan saling menyayangi," katanya.

Menurutnya, kalau seandainya sikap saling mencintai dan menyayangi sudah terbangun baik di tengah-tengah masyarakat, maka tidak akan ada lagi sikap bermusuhan.

Terkait dengan kelompok yang memaksakan pendapatnya, Kiai Ma'ruf menilai itu tidak jadi masalah selama hanya mengajak dan tidak sampai pada tahap bermusuhan. "Kalau sampai bermusuhan, itu yang tidak baik," terangnya.

"Masing-masing (harus) menahan diri. Kalau kemudian saling ngotot, jadi (bermusuhan). Tidak perlu ada saling bermusuhan," pungkasnya. (**Muchlishon Rochmat/Alhafiz K**)

Rais Aam PBNU Jelaskan Sebab Indonesia Jadi Gaduh

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa masalah agama dan negara itu sudah selesai secara politis setelah negara ini menetapkan empat pilar, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45.

"Gaduh lagi itu setelah adanya kelompok-kelompok radikal. Apa itu radikalisme agama ataupun radikalisme sekuler," kata Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci pada Refleksi Kebangsaan 71 tahun Muslimat NU di Hotel Crown Plaza, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Ia mengatakan, radikalisme agama terutama dari kalangan Islam, itu karena masuknya pengaruh global dan pengaruh internal-internal yang telah mereduksi makna jihad.

Menurutnya, jihad itu bukan hanya dimaknai perang, tetapi juga bisa dimaknai perbaikan. Jihad bermakna perang, *qital*, itu kalau dalam suasana perang, tapi jihad juga bisa bermakna *ishlah*, perdamaian, perbaikan, kalau dalam situasi damai.

"Di sini (Indonesia) jihad dalam arti bukan *qitalan* (perang), tapi *ishlahan*, perbaikan dalam semua hal," jelas Kiai yang juga diamanahi Ketua Umum MUI.

Penyimpangan tersebut, menurutnya, tidak hanya pada pemaknaan jihad, tetapi juga karena menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perang ke dalam suasana damai.

"Ini saya kira distorsi pemaknaan jihad atau (distorsi) pemahaman agama," kata Kiai Ma'ruf.

Acara refleksi kebangsaan yang bertemakan *Pancasila,*

Agama, dan Negara ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu KH Shalahudin Wahid, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Yudi Latif. (**Husni Sahal/Alhafiz K**)

Terorisme adalah 'Dhororul Am', Bahaya Global

Terorisme sudah menjadi *dhororul 'am,* bahaya global. Para teroris menebar teror di mana-mana di seluruh dunia. Maka harus ditangkal dengan sekuat upaya dan harus paripurna. Tidak hanya parsial, tidak hanya satu atau dua pihak saja. Menangkal yang paripurna itu di antaranya melalui media, termasuk media dunia maya.

Demikian disampaikan Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin dalam sambutan pembukaan acara workshop *Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya Bersama Media, OKP dan Ormas* yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama *NU Online* di Jakarta, Rabu (22/03/2017)

Ia menjelaskan, terorisme berpangkal dari pemahaman yang distorsi tentang agama. Khususnya dalam memaknai jihad. Mestinya tidak hanya berperang, tetapi juga bermakna islahan, yaitu perbaikan.

Dalam situsi perang jihad dimaknai perang, tapi dalam situsi bukan perang, damai, jihad artinya perbaikan segala aspek. Sosial, budaya, juga politik.

"Indonesia ini wilayah damai. Negeri ini ada di wilayah perjanjian," tutur Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Kiai Ma'ruf menegaskan kepada hadirin yang rata-rata adalah pengelola media Islam moderat bahwa Indonesia adalah umat Islam di Indonesia telah konsensus dengan non-Muslim dalam mendirikan negara. *Al mu'ahad*, non-Muslim yang hidup damai di negeri ini, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Kaum muslimin harus menaati perjanjian itu. Ia pun mengutip hadits yang artinya; siapa yang membunuh *mu'ahad*, ia tidak akan menghirup bau surga.

“Baunya saja tidak dapat, apalagi masuk surga,” tandasnya.

Ditambahkannya, para ulama telah mengajarkan agar sesama bangsa Indonesia saling mengasihi, saling menyayangi laksana tubuh yang satu. Apabila ada bagian yang sakit, semua merasakan sakit. Maka banyak jalan melakukan jihad. Bisa melalui politik, pendidikan, bahkan ekonomi juga bisa menjadi ladang jihad.

Kiai asal Tanara, Banten ini menyatakan, Nahdlatul Ulama mengembangkan *tri ukhuwah* (tiga konsep persaudaraan). Yaitu *ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniah,* dan *ukhuwah insaniyah.* Yakni persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan setanah air, dan persaudaraan sesama manusia. Hal itu yang akan membuat negeri ini sakinah (tenteram bahagia) karena telah ada *mawaddah* (saling mencintai) *warohmah* (saling mengasih sayangi).

“*Matsalul indunisiya fii tarohumi wal ta'awudi kal jasadil wahid*,” ucapnya dengan bahasa Arab.

Karena itu, sambungnya, dakwah harus menggunakan cara *layyinah* (halus) dan substanstif (bukan simbolis). Harus mengajak agar muncul kesadaran, bukan paksaan. Tidak boleh dengan cara galak atau keras.

Seraya mengutip sebuah ayat “*fabima rohamtin mina Allahi linta lahum*” ia menceritakan tentang Nabi Muhammad yang diperintah untuk memperlakukan manusia dengan baik, dengan penuh kasih sayang (rahmat).

“Jangan memaksa, *wala itimidasiyyan, ancamiyyan dan teroriyyan*,” pungkasnya dengan gaya bercanda.

Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Suhardi Alius MH ini dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen antara BNPT, NU, dan perwakilan media yang saat yang hadir. **(Ichwan/Mukafi Niam)**

Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Berbangsa Menurut Rais Aam PBNU

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa di tengah ancaman radikal terorisme serta perpecahan antar elemen bangsa perlu untuk membangun prinsip saling mencintai dan menyayangi (*mawaddah warahmah*) bukan hanya dalam rumah tangga saja, tetapi sebenarnya juga dalam sesama Muslim.

"Sesama umat Islam itu di dalam ber-*mawaddah* dan ber-*rahmah* itu seperti tubuh yang satu, kalau salah satu tubuh sakit, semua tubuhnya sakit. Sakit satu sakit semua. Oleh karena itu, sesama bangsa sebaiknya begitu," tuturnya saat pembukaan workshop *Pencegahan Propaganda Radikal Teroris di Dunia Maya Bersama Media OKP dan Ormas*, Rabu (22/3) malam.

Kiai Ma'ruf, begitu ia disapa, mengutip semacam maqalah, *"Matsalul indunisiyyina fi tawaddihim, watarakhumihim kal jasadil wahid.* Sesama bangsa Indonesia, di dalam saling ber-*mawaddah* dan ber-rahmah, seperti tubuh yang satu."

"Kita ini seperti satu tubuh, kalau salah satu anggota bangsa ini sakit maka seluruh bangsa itu harus menjadi sakit, bahkan juga seluruh global seharusnya juga membangun *mawaddah warahmah*, kalau ada salah satu bangsa yang sakit, seluruh bangsa mestinya juga sakit," sambung cicit Syekh Nawawi al-Bantani itu dalam acara yang diikuti oleh sekitar 200 pegiat media.

Kiai Ma'ruf yang juga ketua umum MUI pusat itu menegaskan apabila prinsip *mawaddah warahmah* tersebut dibangun baik dalam keluarga, masyarakat, sesama umat Islam, sesama bangsa, dan di dalam pergaulan global, maka akan terciptalah sakinah.

“Sakinah itu harmonis, tenang, tenteram, baik keluarga, bangsa, pergaulan internasional,” tegas Kiai Ma’ruf.

Ia juga berharap kepada masyarakat untuk tidak saling membenci dan tidak saling memusuhi di tengah gejolak perbedaan mazhab, politik, bahkan agama.

“Mari kita jaga negara ini, kita kuatkan persatuan, kita kuatkan NKRI, NKRI adalah harga mati bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. **(M. Zidni Nafi’/Fathoni)**

Rais Aam: Persoalan Pilgub DKI Jangan Dibawa ke Jawa Barat!

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menegaskan agar jangan sampai persoalan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) di DKI Jakarta dibawa pada pilgub Jawa Barat yang sudah di depan mata, karena dua wilayah tersebut berbeda.

"Jawa Barat itu Muslim dan dekat dengan ulama. Jangan bawa isu-isu SARA ke Jawa Barat!" tegasnya selepas meresmikan kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (26/4).

Menurut Ketua Umum MUI Pusat ini, ia sudah menangkap isu-isu politik di DKI dibawa ke Jawa Barat. Misalnya ada upa mendiskreditkan parpol pengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yaitu upaya agar calon yang mendukung Ahok di Pilgub DKI jangan didukung di Jabar. "Ya jangan begitulah. Pemilihan itu soal calon. Memenuhi kriteria masyarakat atau tidak," ujarnya.

Untuk itu, calon juga harus paham kriteria masyarakat Jabar itu seperti apa karena dalam pandangan Kiai Ma'ruf, Jabar butuh pemimpin pemerintahan yang membangun kota serta desa. "Jadi, orientasinya bukan partainya apa, tapi calonnya paham apa tidak tentang Jawa Barat," ucapnya.

Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Uu Ruzhanul Ulum

KH Ma'ruf menyayangkan isu yang menimpa Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi yang beredar belakangan ini. Namun sudah diklarifikasi bahwa Ridwan Kamil bukan Syiah dan Dedi Mulyadi bukan Wiwitan. "Keduanya tinggal terus mengklarifikasi, apalagi Dedi itu pengurus NU Purwakarta dan Ridwan Kamil sudah terlihat mendekat ke NU," tuturnya.

Meski demikian, Kiai Ma'ruf mengakui pernah meminta Dedi untuk berijtihad pada ulama tidak berijtihad sendiri. Dedi pun menjawab dengan pasti, bahwa ia mengikuti ulama, dan ulamanya pun ulama NU. "Maka Dedi bagus itu. Kitab Kuning jadi program sekolah-sekolah di Purwakarta. Dan Ridwan Kamil tinggal membuktikan apakah Syiah atau bukan. Yang jelas, Jabar itu butuh pemimpin yang bisa membangun kota dan desa," ujarnya.

Kiai Ma'ruf juga menilai sosok Ridwan Kamil pemimpin yang membangun fisik, sementara Dedi membangun kuktur. Kalau keduanya disatukan sangat bagus memimpin Jawa Barat. "Bagus itu kalau Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi berpasangan. Manis pokoknya. Apalagi Ridwan Kamil menguasai perkotaan, sementara Dedi Mulyadi di perdesaan," tuturnya.

Saat ditanya sosok Uu Ruzhanul Ulum, Kiai Ma'ruf merasa belum banyak mengenal Uu karena bertemunya juga baru hari ini. "Terpenting warga NU harus memilih calon dari NU. Yang peduli ke NU karena NU mayoritas di pedesaan," katanya.

Sementara itu, Uu Ruzhanul Ulum mengakui kalau popularitas dia masih tertinggal dari Ridwan Kamil maupun Dedi Mulyadi. Namun popularitas juga bukan jaminan seperti Pilgub DKI yang akhirnya dimenangkan calon yang sebelumnya tak populer. "Terpenting saya ini NU. Bukan kultur saja tapi pengurus NU," ucapnya.

Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Abun Bunyamin bersama Ketua Tanfidziyah PCNU KH Atam Rustam mengatakan kepedulian Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum kepada NU tak perlu ditanyakan lagi. Terbaru bahwa berdirinya Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya yang berdiri megah di Jalan Badak Paeh Singaparna berkat bantuan Uu yang ingin memajukan NU Tasikmalaya. "Sumbangan dari Pak Uu terbesar sehingga kami bisa memiliki Kantor NU semegah ini," kata KH Abun. **(Nurjani/Abdullah Alawi)**

Rais Aam PBNU: Ayat Perang Tak Relevan Dipakai di Indonesia

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa masalah radikalisme sudah merupakan bahaya global. Radikalisme harus ditangkal melalui berbagai cara tak terkecuali di dunia maya yang saat ini sudah menjadi bagian hidup masyarakat khususnya generasi muda.

Ia mengajak kepada seluruh media *online* untuk bersatu dan serentak menyuarakan konten-konten damai kontra-radikalisme agar masyarakat paham serta dapat menerima konten yang benar dan yang seharusnya mereka terima.

"Radikalisme dan terorisme berasal dari pemahaman yang keliru khususnya memahami makna jihad," tegas Kiai Ma'ruf yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia saat memberikan pengarahan pada peserta workshop *Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di dunia Maya Bersama OKP dan Ormas*, Rabu (22/3) malam.

Kiai Ma'ruf menjelaskan, jihad bukan hanya perang namun jihad bisa bermakna perbaikan segala aspek seperti sosial, budaya, politik, dan sebagainya. "Banyak ayat Al-Qur'an tentang perang yang dipakai di daerah damai. Indonesia negara damai dan ayat itu tidak berlaku," jelasnya.

Apalagi di Indonesia, sebuah negara yang dibangun di atas kesepakatan dan perjanjian dari berbagai agama dan suku, radikalisme dan terorisme harus dilawan. "Indonesia merupakan *darussalam*, negara damai yang bukan dalam wilayah perang," tegasnya.

Ia menegaskan, non-Muslim yang sudah membuat kesepakatan dengan Muslim tidak boleh dimusuhi dan dibunuh. Menurutnya, siapa saja membunuh non-Muslim yang sudah sepakat hidup dalam perjanjian maka ia tidak akan mencium bau surga.

Oleh karenanya NU sebagai ormas keagamaan mengedepankan prinsip *ukhuwah* (kebersamaan) yang ia sebut sebagai tri *ukhuwah*, yaitu *ukhuwah wathaniyah* (kebersamaan dalam bernegara), *ukhuwah islamiyah* (kebersamaan dalam agama islam) dan *ukhuwah insaniyah* (kebersamaan sesama manusia).**(Muhammad Faizin/Mahbib)**

Rais Aam Tegaskan Larang Aksi 112

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh ulama khususnya di Banten agar menjaga umat dari ajaran atau akidah-akidah yang menyimpang.

Menurutnya, ajaran atau akidah menyimpang, akan mengubah arus cara berfikir dan gerakan yang mengarah ke ekstrim radikal. Baik itu radikal agama maupun radikal sekuler.

Untuk itu, ia meminta para ulama jangan hanya diam di pesantren, tetapi harus bergerak keluar untuk lebih mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Meski begitu, jangan dikonotasikan ulama meninggalkan pesantren. Karena peran di ulama di pesantren tetap penting, untuk mencetak kader atau regenerasi ulama.

"Nahdlatul Ulama itu harus saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. *Ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah insaniyah*, ditambah satu lagi u*khuwah nahdliyah*," kata KH Ma'ruf Amin, saat memaparkan pendapatnya sebagai pembicara kunci pada *Silaturahim dan Dialog Kebangsaan Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren dan Syuriyah PCNU se-Banten*, di Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Rabu (8/2).

Penambahan satu *ukhuwah nahdliyah*, lanjut dia, jangan sampai ketika seluruh warga NU menjalankan *ukhuwah islamiyah*, *wathoniyah*, dan *insaniyah*, justru terpecah-pecah sesama warga atau di internal NU sendiri. Makanya, perlu ditambah *ukhuwah nahdliyah*.

KH Ma'ruf Amin yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tersebut menambahkan, untuk menjaga negara perlu ada kerjasama yang baik antara ulama

dan umara. Agak sulit rasanya menjaga negara tanpa adanya kesatuan kekuatan antara ulama dan umara tadi.

Ia memuji peran Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mampu mengendalikan situasi politik nasional beberapa waktu ini, dengan mendekati dan melibatkan para ulama. Kiai Ma'ruf juga mendukung imbauan Kapolda Banten, Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo agar masyarakat Banten tidak ikut aksi 112.

"Atas nama Rais Aam PBNU, saya instruksikan warga NU tidak turun aksi 112," tegasnya. **(Malik Mughni/Zunus)**

Rais Aam PBNU: Sentimen SARA Ancam Kebinekaan NKRI

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyayangkan suasana tidak kondusi atas kondisi masyarakat Indonesia belakangan ini. Menurutnya, perang opini belakangan ini dengan memainkan masalah SARA mengeruhkan iklim persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan Kiai Ma'ruf dalam tausiyah pada peringatan Harlah Ke-91 NU di halaman Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1) malam.

"Sentimen SARA mengancam kebinekaan RI," kata Kiai Ma'ruf di hadapan ratusan hadirin yang memadati lokasi peringatan Harlah Ke-91 NU.

Kiai Ma'ruf meminta Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang hadir pada kesempatan itu untuk mengambil prakarsa dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menurutnya, NU di setiap era selalu berkontribusi bagi keutuhan bangsa Indonesia.

"Meskipun posisinya kadang kala berseberangan dengan pemerintah, NU ini organisasi yang konsisten mengamankan Pancasila," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf yang juga ketua umum MUI menambahkan bahwa selain menjaga Pancasila NU juga harus terus mengembangkan diri di pelbagai bidang. Prinsip NU *Almuhafazhah alal qadimis shalis wal akhdzu bil jadidil ashlah* (menjaga tradisi yang baik dan mengadopsi kebaruan yang lebih baik) mesti ditambah dengan *ila ma hual ashlah tsummal ashlah fal ashlah* (menuju yang lebih baik, dan terus lebih baik lagi).

"Jadi semuanya itu dilakukan dengan inovatif. Hari ini sesuatu dianggap baik, tetapi besok sudah tidak baik lagi. Apa yang baik besok hari, di kemudian lusa belum tentu. Kita maju sama-sama," tandas Rais Aam PBNU. (**Alhafiz K**)

KH Ma'ruf Amin: Beda Agama, Mazhab, dan Beda Partai, Harus Saling Menghargai

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa Islam secara teologis adalah agama yang sangat toleran. Islam, kata Kiai Ma'ruf, secara jelas menyebut di dalam Al-Qur'an bahwa masing-masing beragama sesuai dengan pilihan hatinya.

Demikian disampaikan Kiai Ma'ruf dalam taushiyah pada peringatan Harlah Ke-91 NU di halaman Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1) malam.

"Islam secara teologi itu toleran. *Lakum dinukum waliya din* (untukmu agamamu, untuk kami agama kami). Tetapi para ulama menambahkan, *lana madzhabuna, walakum madzhabukum* (untuk kami mazhab kami, untuk kamu mazhabmu). Ini belum cukup, *lana partayuna wa lakum partayukum* (untuk kami partai kami, untuk kamu partaimu)," kata Kiai Ma'ruf disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Kiai Ma'ruf, NU berdiri di tengah. NU menjaga agar pemahaman agama tidak ektrim ke kiri maupun ke kanan. NU tidak sepakat dengan fundamentalisme kanan, tekstualis, teror, intimidasi, dan ekstremisme sekuler.

"Kita maju sama-sama. Mari beda agama, beda mazhab, dan beda partai, saling menghargai. Saya minta Ketua Umum PBNU Kiai Said mengambil peran prakarsa menjaga keutuhan bangsa Indonesia," tandas Rais Aam PBNU. (**Alhafiz K**)

KH Ma'ruf Amin Tak Aktif di Medsos, Hati-hati Akun Palsu!

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin selama ini tidak memiliki akun baik Twitter, Facebook, Instagram atau sejenisnya. Sehingga, siapa pun yang mengatasnamakan diri sebagai akun kiai yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini dipastikan palsu.

"KH. Ma'ruf Amin, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU tidak memiliki akun Twitter, dan tidak aktif di media sosial," ujar Ketua MUI Bidang Infokom H Masduki Baidlowi.

Baru-baru ini muncul akun Twitter dengan nama @ KHMa'ruf_amin dan memasang gambar wajah Kiai Ma'ruf sebagai foto profilnya. Setelah dilakukan pengecekan, kata Masduki, akun tersebut jelas bukan milik Kiai Ma'ruf.

"Tindakan pemalsuan ini jelas melanggar hukum, untuk itu disampaikan kepada aparat kepolisian untuk mengusut pelaku tindak pidana ini dan melakukan penegakan hukum," katanya, Senin (30/1) melalui siaran pers.

Wakil sekjen PBNU ini mengingatkan masyarakat agar tak terkecoh dengan tindakan tak bertanggung jawab ini.

Klarifikasi yang sama juga disampaikan Mahbub Ma'afi, staf Syuriyah PBNU. Ia sudah mengonfirmasi kepada orang-orang dekat Kiai Ma'ruf, termasuk keluarganya, dan hasilnya Kiai Ma'ruf memang tidak memiliki akun di media sosial mana pun. **(Mahbib)**

KE-NU-AN

Kiai Ma'ruf Amin: Fiqih Sosial, Metode Mencari Solusi Kebangsaan

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menegaskan betapa fiqih sosial, atau fiqih kontekstual, dapat menjadi metode mencari solusi masalah-masalah kebangsaan.

Ia menyampaikan hal itu pada kuliah umum *Pendekatan Nalar Ushul Fiqh dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, dalam rangka mmperingati Haul Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Mahfudh bin Salam di Ma'had Aly Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah, Rabu (6/12).

Agenda ini, dihadiri sesepuh pesantren Kajen, Rais Syuriyah PCNU Pati KH Aniq Muhammadun, Ketua Rabithah Ma'ahid PBNU dan pengasuh Pesantren Maslakul Huda KH Abdul Ghaffar Rozien, dosen-dosen Institut Pesantren Mathaliul Falah (Ipmafa), dan perwakilan beberapa pesantren di Jawa Tengah.

Menurut Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Sahal Mahfudh sangat berjasa besar dalam meletakkan pondasi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. "Pemimpin MUI dan NU yang sebenarnya itu Kiai Sahal Mahfudh, saya hanya penerusnya," ungkap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Menurutnya, kepemimpinan Kiai Sahal sangat bagus dalam mengompromikan imamah (kepemimpinan) yang bisa mempersatukan mayoritas kelompok umat Islam.

"Selama ini, belum ada *imamah syakhsyiyah* (kepemimpinan individual), yang ada *imamah Nahdliyah, imamah* Muhammadiyah, dan yang lain. Bagaimana mewujudkan imam yang bisa mengkoordinasikan? Maka ada *imamah institusionaliyah*, atau pemimpin kelembagaan," tambahnya.

"Kiai Sahal yang memulai membangun imamah itu, yakni di Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia, saya hanya penerusnya," terang beliau.

Di Indonesia, ungkap Kiai Ma'ruf Amin, ada dua arus besar dalam cara pandang umat Islam, yakni kelompok yang tekstualis dan liberal. "Kelompok tekstualis, disebut Imam al-Qarafi, sebagai *'al-jumud ala al-manqulat'*. Terjebak pada teks yang statis, maka jadi stagnan," jelas pengasuh pesantren di Tanara, Banten ini.

"Kelompok tekstual, ada stagnasi dan statis. Ini jika ada masalah yang tidak ada rujukannya di kitab kuning, maka *mauquf*. Maka terjadi kekosongan rujukan dalam berfatwa, atau menyikapi masalah," jelasnya.

"Pada Munas Alim Ulama di Lampung, ada pendekatan fiqih *manhaji*. Ada pendekatan *al-jam'u wat-taufiq*, jika ada pendekatan yang bertentangan, maka harus dikompromikan terlebih dahulu," papar Kiai Ma'ruf.

"Cara berpikir ulama NU tidak tekstual dan tidak liberal. Ini cara pendekatan para ulama yang bergulat dengan kajian *ushul al-fiqh*. *Makharij al-fiqh*, selanjutnya mencari *makharij wathaniyyah*," jelasnya.

Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa pemimpin kita menggunakan pendekatan *mitsaq al-madinah*, perjanjian Madinah. Ketika Nabi Muhammad membuat kesepakatan kehidupan damai dengan warga antar etnis dan agama.

"Negara kita bukan *darul Islam*, bukan *darul kufr* (negara kafir), tapi *daarul 'ahd*, negara kesepakatan. Maka, konteksnya hubungan antar-agama, itu *mu'ahadah*, kesepakatan," terang cucu Kiai Nawawi al-Bantani.

Pada munas alim ulama di Situbondo, para kiai Nahdlatul Ulama memilih menggunakan metode *al-jam'u wat taufiq*, metode kompromi.

Nahdlatul Ulama memilih Pancasila dan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan.

"Bung Karno itu pemimpin yang sah. Dengan metode *tauliyah*, akad *waliyul amri*. Bung Karno diangkat sebagai *waliyul amri ad-dharuri bis-syaukah*. Bung Karno bukan *dzu syaukah*, tapi *bi-syaukah*. Artinya, beliau tidak punya cukup *power*, kekuasaan, tapi mendapat dukungan yang kuat dari kalangan politik dan militer," jelas Kiai Ma'ruf Amin. Lebih lanjut, Rais Aam PBNU ini menambahkan, "Ketika itu Bung Karno sebagai pemimpin pada masa darurat, dengan dukungan dari politik dan militer."

Mengenai perkembangan pesantren, Kiai Ma'ruf Amin mendorong santri menjadi aktor dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, dalam bidang ekonomi, politik maupun birokrasi.

"Pesantren harus menjadi aktor, menjadi pusat dalam perkembangan zaman sekarang. Santri harus aktif mencipta arus baru ekonomi bangsa. Ini yang dikembangkan RMI PBNU, di bawah kepemimpinan Gus Rozien, yang mendorong pesantren agar mandiri dan membangun lembaga ekonomi," jelas Kiai Ma'ruf Amin.

KH Abdul Ghaffar Rozien, Ketua RMI PBNU dan Pengasuh Pesantren Maslakul Huda, menjelaskan bahwa sudah saatnya santri-santri bergerak dinamis.

"Selama ini teks-teks pesantren hanya menjadi rujukan masalah keagamaan. Sudah saatnya, teks-teks dan metode ushul fiqih ini menjadi bagian penting untuk mencari solusi masalah-masalah kebangsaan, ini prinsipnya: *tanzilun nushus ala al-waqi'*. Santri harus aktif dan dinamis," terang Gus Rozien.

Ma'had Aly Maslakul Huda Kajen Pati, berkonsentrasi pada pengembangan kajian ushul fiqih, sebagaimana warisan gagasan "fiqih sosial" dari Kiai Sahal Mahfudh. Selain

itu, Pesantren Maslakul Huda juga membangun lembaga ekonomi serta unit-unit usaha untuk menunjang kemandirian pesantren. **(Red: Mahbib)**

Sidang Pleno, Rais Aam Berharap Hasil Munas-Konbes Solutif

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin secara resmi membuka Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 yang digelar di Pondok Pesantren Darul Qur'an, Bengkel, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (25/11).

Sidang Pleno menjelang penutupan ini diisi laporan dari sidang-sidang komisi, antara lain Bahtsul Masail Maudlu'iyah, Bahtsul Masail Waqi'iyah, Bahtsul Masail Qanuniyah, Organisasi, Program, dan Rekomendasi. Sebelumnya diskusi intensif dilaksanakan masing-masing komisi di forum terpisah.

Rais Aam berharap hasil dari keputusan Munas-Konbes NU kali ini menjadi solusi dan sumbangsih signifikan bagi kehidupan bangsa dan negara, dan bisa menjadi panduan bagi seluruh warga NU di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, wilayah, cabang, wakil cabang, hingga ranting.

"Menjadi garis-garis yang akan menjadi panduan bagi langkah-langkah NU ke depan," kata Kiai Ma'ruf didampingi Wakil Rais Aam KH Miftahul Ahyar.

Sidang dipimpin oleh Ketua PBNU Robikin Emhas. Turut duduk di atas panggung, Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta Munas-Konbes NU 2017 yang terdiri dari delegasi PWNU seluruh Indonesia, utusan pondok pesantren, dan lain sebagainya.

Musyawirin (sebutan untuk peserta forum ini) sebelumnya tersebar di enam sidang komisi, yakni Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-

Maudlu'iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qanuniyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan), Program, Organisasi, dan Rekomendasi.

Perhelatan yang dibuka Presiden Joko Widodo ini akan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla sekitar pukul 13.30 WITA di lokasi sidang pleno. **(Mahbib)**

Ini yang Dilakukan Syuriyah PBNU Periode Rais Aam KH Ma’ruf amin

Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan, pengurus Syuriyah PBNU selalu mengadakan pertemuan bulanan untuk melakukan monitoring kegiatan dan arahan kepada tanfidziyah. Syuriyah PBNU terus mengingatkan tanfidziyah tentang apa saja yang harus dilakukan, yang belum dikerjakan, dan apa saja yang mesti disempurnakan.

“Itu merupakan kebiasaan baru di lingkungan Pengurus Besar NU Syuriyah,” katanya kepada para peserta Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB, kota Mataram, Kamis malam, (23/11).

Kemudian, kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini, Syuriyah PBNU juga melakukan kunjungan ke daerah untuk mendorong agar gerakan-gerakan NU di bawah lebih baik lagi dan lebih giat lagi.

Syuriyah PBNU, lanjutnya, mendorong supaya kiai-kiai yang berada di daerah agar bekerja untuk NU. Kiai-kiai yang didorong itu tidak hanya struktural, tapi kultural, dan pimpinan pondok-pondok pesantren.

“Karena NU tidak hanya milik pengurus, tapi milik ulama, gerakannya pun gerakan ulama. Dan ulama itu tidak hanya struktural, tapi juga kultural,” jelasnya pada sidang Laporan Perkembangan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Muktamar, selepas penjabaran Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Syuriyah PBNU, mengingatkan bahwa pengurus NU hanya sopir saja yang melaksanakan tugas organisasi, tapi NU adalah gerakan ulama dalam menjaga dan memperbaiki, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tujuannya untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang memerlukan dan membutuhkan," katanya.

Jadi, gerakan ulama ini terus dilakukan supaya NU dalam segala aspeknya perlu dikembangkan.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU dibuka Presiden Joko Widodo Kamis siang. Hajatan tingkat nasional itu digelar di lima pondok pesantren dan akan berlangsung hingga 26 November. **(Abdullah Alawi)**

Rais Aam: Pesantren Harus Go Internasional

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mendorong kaum pesantren untuk semakin percaya diri berperan tak hanya di level nasional tapi juga internasional. Menurutnya, dunia khususnya negara-negara Eropa kini sedang tertarik dengan karakter keberislaman di Nusantara.

Ia menyampaikan hal itu pada acara Malam Ramah Tamah Pemerintah Kota Mataram dengan peserta Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017, Rabu (22/11) malam.

Sebelumnya Kiai Ma'ruf bercerita tentang tamunya dari salah satu negara di Eropa yang mengaku penasaran dengan Islam Nusantara. Tamunya ini bahkan di kemudian hari membuat film tentang pesantren dan berjanji bakal diputar di seluruh negara di Eropa.

Orang-orang Barat, kata Kiai Ma'ruf sesungguhnya tidak keberatan dengan hadirnya umat Islam di tengah-tengah mereka. "Tapi mereka *pengennya* Islam yang ada di sana adalah Islam yang seperti Nahdlatul Ulama," tambahnya.

Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berpendapat, di antara faktor diterimanya Islam Nusantara oleh dunia adalah karakternya yang moderat dan toleran di tengah bangsa yang plural.

"Saya menyebutnya *layyinah,* santun. Banyak yang salah paham, bahwa NU itu lemah. Bukan. Yang benar adalah santun. Cara berdakwahnya tidak memaksa, harus suka rela," ujarnya.

"Jadi santri harus *go* internasional," ucapnya kemudian.

Ia mengatakan, pengamat luar negeri yang mencermati pesantren percaya bahwa Islam di Indonesia adalah pemimpin

masa depan dunia. Apalagi, tambahnya, sesuai dengan gambar logonya NU didirikan memang untuk berkiprah dalam skala dunia.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Mataram TGH Ahyar Abduh, Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang Mustasyar PBNU KH Nasaruddin Umar, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan para pejabat tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram. **(Mahbib)**

Rais Aam PBNU: Waspada Terhadap Kelompok yang Mengaku Aswaja

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini banyak kelompok yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tetapi hanya berpegang pada teks atau *nash* dengan pemahaman tekstualis. Menyikapi hal ini warga Nahdliyin harus selektif dan tidak gampang terpengaruh oleh kelompok-kelompok tersebut.

Hal ini disampaikan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI saat memberikan taushiyah pada puncak kegiatan Hari Santri Nasional 2017 Kabupaten Tanggamus di Taman Terbuka Hijau Kota Agung, Sabtu (5/11).

Lebih lanjut Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa kebiasaan kelompok ini paling gampang menyalahkan paham dan pandangan orang lain dan kelompok lain yang berbeda.

"Ciri dakwah dari kelompok ini cenderung galak, memaksa, mengintimidasi dan intoleran. Padahal akidah Islam sangat toleran," kata Kiai Ma'ruf.

Ia mengimbau warga Nahdlatul Ulama harus mengikuti ajaran Ahlussunah wal Jam'ah an-Nahdliyah, bukan kelompok yang mengaku-aku berpaham Aswaja. Kewaspadaan ini ditanam agar Nahdliyin tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. (**Muhammad Faizin/Alhafiz K**)

Rais Aam: Kepemimpinan Spiritual Bentuk Warna Pesantren

Kepemimpinan spiritual telah membentuk warna tersendiri dalam lembaga pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Model kepemimpinan ini harus dan akan selalu melekat dalam pesantren dan bisa dijadikan model dalam setiap lembaga pendidikan maupun organisasi.

"Kepemimpinan spiritual kiai di pesantren sudah menjadi watak dasar sejak munculnya lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Kepemimpinan spiritual sangat berbeda dengan model kepemimpinan apapun yang kita kenal," kata Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin kepada *NU Online* di Jakarta, Senin (06/11).

Menurut Kiai Ma'ruf, demikian ia akrab disapa, kepemimpinan kiai yang demikian ini bukan hanya nampak dalam transfer ilmu pengetahuan semata. Namun lebih dari itu, kepemimpinan ini sudah melampaui batas-batas fisikal.

"Kepemimpinan ini tidak lagi hubungan antara guru dan murid di sekolah atau antara dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Tapi lebih dari itu, kepemimpinan ini adalah seperti hubungan orang tua dan anaknya," katanya.

Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa pengaruh kiai sangat besar sekali dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada santri dan masyarakat luas dan akan selalu menjadi panutan bagi mereka.

"*Sami'na wa atho'na* (kami mendengar dan kami mentaati) itulah yang menjadi ciri khas bagaimana pengaruh kiai bagi santri dan masyarakat luas," katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga memandang perlu bagi setiap orang untuk selalu meneladani kiai dengan jiwa kepemimpinannya yang selalu tersambung

sanad keilmuannya dengan Rasulullah dan selalu mendoakan bagai kebaikan santri dan masyarakat luas.

"Maka bentuk dari hubungan *ruhiyyah* antara santri dan kiainya setidaknya tercermin dari kegiatan tahunan, yang biasa kita kenal dengan istilah haul. Acara ini menjadi jembatan bagaimana ketersambungan itu akan tetap terjalin," terangnya. **(Masdar)**

Kiai Ma’ruf: Rasulullah Tokoh Perubahan

Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh perubahan. Rasulullah mengubah masyarakat jahiliyah yang tidak tahu nilai-nilai yang baik dan yang buruk, menjadi masyarakat yang tahu amar ma’ruf nahi munkar.

“Rasulullah tokoh perubahan yang luar biasa karena perubahan masyarakat itu dilakukan hanya 23 tahun,” kata Kiai Ma’ruf saat mengisi *Maulid Kebangsaan* di halaman Gedung PBNU, Sabtu (16/12) sore.

Selama 23 tahun itu, Rasulullah memberikan dampak yang besar.

“Berbeda dengan kita yang mungkin membawa dampak pelan sekali, atau tanpa membawa dampak,” lanjut Kiai Ma’ruf.

Karenanya, *Maulid Kebangsaan* yang digagas PP Fatayat NU, Kiai Ma’ruf berharap bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk membuat perubahan, seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW yang melakukan perbaikan dari waktu ke waktu.

“Apalagi NU sebagai organisasi perubahan, harus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Karena NU adalah organisasi kebaikan,” ujar kiai yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perubahan yang dilakukan, sambung Kiai Ma’ruf, hendaknya harus berkelanjutan, serta tetap berada di dalam koridor kebangsaan.

“Jangan dengan intoleran, jangan mengatakan golongan lain kafir, sesat, *toghut*. Juga tidak dengan aksi radikal yang

menginginkan perubahan tapi dengan menghancurkan yang ada seperti yang dilakukan teroris," tandasnya. **(Kendi Setiawan)**

Peringatan Hari Santri, Capaian Fenomenal Dua Tahun Kepengurusan PBNU 2015-2020

Muktamar NU di Jombang 2015 lalu menjadi babak baru kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar ke-33 inilah mekanisme pemilihan rais aam direformasi. Sistem Ahlul Halli wal Aqdi dimana orang-orang terpenting dan berpengaruh diberi kewenangan untuk menentukan pimpinan tertingginya, untuk pertama kalinya dipilih sebagai sarana demokratis pemilihan rais am PBNU.

Hasilnya duet kepemimpinan KH Ma'ruf Amin sebagai Rais aam; dan KH. Said Aqil Siroj sebagai mandataris muktamar, resmi dikukuhkan pada Kamis, 6 Agustus 2015.

Demikian terungkap saat *Sidang Pleno Kedua* pada Munas Konbes 2017 di pelataran Masjid Islamic Center, NTB, Kamis (23/11).

Disebutkan dalam dua tahun masa kepemimpinan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin dan Ketum KH Said Aqil Siroj, PBNU telah menorehkan sejumlah capaian.Salah satunya adalah peresmian 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keppres No. 22 Tahun 2015.

Keputusan presiden ini bukan saja mengandung makna penghargaan kepada ulama dan pengakuan kepada kaum santri. Lebih dari itu, Hari Santri telah berhasil menyambung dan menghidupkan kembali obor-obor kejuangan NU yang lama terputus dan mati.

Awal kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2020 langsung memperjuangkan eksistensi santri. Lika-liku perjuangan tidak menghalangi perjuangan penetapan Hari Santri. Pemerintah awalnya mengusulkan Hari Santri ditetapkan pada 1 Muharram/ tahun baru Islam.

Namun usul itu ditolak oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj karena 1 Muharram dirayakan seluruh Muslim di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kiai Said pun mengusulkan 22 Oktober sebagai Hari Santri karena ada filosofi kesejarahan yakni keluarnya Resolusi Jihad, pemantik perjuangan santri dan kiai melawan kolonialisme dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Usulan ini kemudian diperjuangkan PBNU dengan cara menggelar Kirab Resolusi Jihad pada 18-22 Oktober 2015 dari Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur dan *finish* di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat yang ditutup dengan apel peringatan Hari Santri. Hal yang sama pada 2011 juga sempat dilakukan para aktivis muda NU dengan menggelar kirab napak tilas Resolusi Jihad Surabaya-Jakarta.

Kemudian, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Meskipun negara dinilai terlambat dalam mengakui eksistensi santri, berbagai kalangan terutama pesantren mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Puncak penyampaian keputusan tentang Hari Santri ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta.

Pada tahun 2016, PBNU menggelar rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri pertama. Selain Kirab Resolusi Jihad yang dimulai dari ujung pulau jawa, Banyuwangi ke Cilegon dan finis di Monumen Nasional (Monas) untuk upacara pada 22 Oktober 2016, PBNU menggelar acara 1 miliar Shalawat Nariyah serentak seluruh Nusantara pada 21 Oktober 2016 malam.

Sementara peringatan Hari Santri kedua pada 2017 ini beberapa daerah menggelar rangkaian Hari Santri secara mandiri bersinergi dengan berbagai pihak. PBNU pada tahun ini menitikberatkan pada dua acara pembacaan 1 miliar Shalawat Nariyah serentak seluruh Nusantara dan apel Hari Santri di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. **(Kendi Setiawan)**

Kiai Ma'ruf Amin Berkisah Tentang Sejarah Bahtsul Masail

Problematika hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat semakin kompleks. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan terus berupaya memberikan solusi terhadap problematika tersebut dengan memperkuat forum Bahtsul Masail.

Terkait keberadaan Bahtsul Masail, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menceritakan pertama kali tradisi akademik dalam pengambilan hukum di lingkungan NU itu terbentuk sebagai lembaga.

"Dulu bernama Lajnah Bahtsul Masail, jadi kalau ada perlu-perlu, kita bahtsul masail. Tapi karena banyaknya masalah yang terhimpun, akhirnya bahtsul masail itu dilembagakan, resmi dilembagakan menjadi Lembaga Bahtsul Masail," ujar Kiai Ma'ruf, Jumat (10/11).

Hal itu dia sampaikan ketika memberikan pengarahan dan tausiyah kepada para peserta Bahtsul Masail Pra-Munas dan Konbes NU 2017 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat.

Ketika Munas NU di Lampung tahun 1992, Kiai Ma'ruf sebagai katib aam menyampaikan kepada KH Ali Maksum terkait banyak persoalan yang mengalami *tawaquf* (tertunda, penundaan) karena belum ketemu *qaul*-nya.

"Kiai Ali maksum meminta coba carikan jalannya, waktu munas Lampung, kita memulai pembahasan itu tidak hanya pembahasan *waqi'iyah*, tetapi juga *maudluiyah*. Salah satu pembahasan *maudluiyah* waktu tentang sistem pengambilan keputusan di lingkungan NU," terang Ketua Umum MUI Pusat ini.

Menurutnya, langkah tersebut bukan hal baru, tetapi justru mengembalikan yang ada di dalam NU, artinya *manhaj* dalam rangka mengembalikam model di NU yang tadinya hanya sebatas bermazhab secara *qauli*, tetapi juga *manhaji.*

"Sehingga lahirlah *fiqih manhaji*," terang Kiai Ma'ruf. **(Fathoni)**

KH Ma'ruf: Soliditas Keumatan dan Kebangsaan Juga Tugas Ulama

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ma'ruf Amin menghadiri Halaqah Dakwah Wasathiyah An-Nahdliyah yang diadakan oleh PWNU Sulawesi Selatan di Auditorium KH Muhyiddin Zain Universitas Islam Makassar, Sabtu (20/5).

KH Ma'ruf Amin menyampaikan, "Kepengurusan syuriyah saat ini memiliki tugas untuk selalu turun ke daerah karena pada dasarnya PBNU tidak bisa mengontrol dari pusat, tetapi harus turun langsung untuk bersilaturrahim bersama ulama seluruh Indonesia."

Pemilik NU itu ulama. Pengurus hanya sopir atau yang menjalankan. Ulama jangan hanya mengurus pesantren, tetapi harus menjaga soliditas keumatan, kebangsaan, dan bernegara.

Selain itu tanggung jawab keumatan, NU harus menjadi penggerak bukan digerakkan. Syuriyah harus menggerakkan dan tanfidziyah yang menjalankan.

Saat ini banyak kelompok yang mengaku Ahlusunnah wal Jamaah tetapi tidak mengakui Asy'ariyah dan Maturidiah, bahkan menyesatkan kedua ulama besar ini. Karena itu, kita harus menyebut "Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyah". Sementara pihak yang menyesatkan mesti disebut "Ahlusunnah wal Jamaah Wahabiyah".

Secara garis besar NU meliputi lima hal, yaitu aqidah gerakan, aqidah yang sesuai ajaran Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. *Kedua*, fiqrah yakni pola pikir, *Ketiga*, amaliah, yaitu istighotsah, qunut subuh, dan lain sebagainya.

Keempat, harakah yakni gerakan melindungi umat dari akidah yang menyimpang seperti gerakan radikal, kelompok

yang akan mengubah komitmen kebangsaan kita, yakni Pancasila dan NKRI. *Kelima*, jam'iyyah yakni organisasi yang memiliki aturan-aturan, yaitu Qanun Asasi dan aturan lainnya. Dalam tradisi NU berbeda pendapat itu biasa, tetapi ketika sudah ada keputusan, maka semua pengurus harus mentaati.

Selain itu Nahdlatul Ulama harus menjadi kaidah penuntun dalam berbangsa dan bernegara. Nahdlatul Ulama harus menjadi pelayan umat untuk memudahkan. NU harus melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam semua hal, yaitu aqidah, pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Di sesi arahan dan tausiyahnya Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin meminta Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar untuk memberikan tausiyah.

Tampak hadir Rektor Universitas Islam Makassar Majdah Agus Arifin Nu'mang, Kepala Kantor Kanwil Kemenag Sulsel Abd Wahid Thahir, para pengurus syuriyah dan tanfidziyah NU se-Sulawesi Selatan, serta Pimpinan Pesantren se-Sulawesi Selatan. (**Andy Muhammad Idris/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf Amin: Boleh Beda Mazhab, Agama, dan Partai, Tapi NKRI Sudah Final

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa perbedaan adalah fitrah. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, setiap warga harus saling menghargai di dalam perbedaan.

Hal ini disampaikan KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI saat memberikan tausiyah pada puncak kegiatan Hari Santri Nasional 2017 Kabupaten Tanggamus di Taman Terbuka Hijau Kota Agung, Ahad (5/11).

"Kita harus menghargai setiap perbedaan baik itu beda mazhab, beda paham, dan beda partai sekalipun," kata Kiai Ma'ruf.

Ia mengatakan bahwa di Indonesia diskusi soal hubungan beragama dan bernegara sudah selesai. "Kita tidak boleh lagi menjadi kelompok yang intoleran dan kelompok yang menginginkan negara di dalam negara," jelasnya.

Ia menegaskan pula bahwa Indonesia sudah memiliki ideologi negara yang tepat di tengah kemajemukan yang ada di dalamnya.

"Indonesia adalah *darus shulhi*, negara yang dibangun atas kesepakatan anak bangsa. NKRI bagi NU sudah final," tegas Kiai Ma'ruf. (**Muhammad Faizin/Alhafiz K**)

Rais Aam: Kalau Mau *Take off*, Landasan Harus Kuat

Salah satu tema besar yang diangkat pada pra Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 yang diselenggarakan di Lampung adalah *Penguatan Organisasi Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama.*

Hal ini menjadi sangat penting direalisasikan menjelang satu abad NU yang merupakan *jamiyah diniyah* terbesar di dunia pada 2026. Hal tersebut diingatkan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin saat memberikan tausiyah Kebangsaan pada pembukaan kegiatan, di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandarlampung, Sabtu (4/11).

"NU harus siap menghadapi masa satu abad karena tiap awal setelah 100 tahun akan ada pembaharuan persoalan agama dari sisi harakahnya," kata kiai yang Ketum MUI ini.

Ia mengibaratkan posisi NU saat ini seperti pesawat terbang yang akan melakukan lepas landas menuju posisi yang lebih tinggi.

"Kalau mau *take off,* landasan harus kuat," tegasnya.

Selain penguatan organisasi, reforma agraria untuk pemerataan kesejahteraan warga juga diangkat dalam rangka menghilangkan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Menurutnya harus ada arus baru ekonomi Indonesia yang mampu merubah superioritas dari para konglomerat dalam penguasaan aset kekayaan melalui maksimalisasi kekuatan ekonomi dari bawah.

"Perekonomian lama lebih menguatkan kekuatan atas yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi

kekuatan bawah. Yang tadinya diharapkan bisa mengalir ke bawah ternyata sampai saatnya, netes pun tidak," katanya pada pada acara yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Jalil.

Oleh karenanya dengan pembahasan reforma agraria pada munas dan konbes tahun ini, diharapkan akan dapat tumbuh kekuatan ekonomi bawah.

"Nantinya akan bisa ada Hamdalah Mart, Basmalah Mart dari Kekuatan ekonomi bawah khususnya dari pesantren," harapnya.

Kiai Ma'ruf juga mengatakan akan ada pembahasan dalam munas dan konbes mengenai hukum dalam agama Islam tentang individu yang memiliki kekayaan ekonomi dan sangat dominan dari yang lainnya. **(Muhammad Faizin/ Kendi Setiawan)**

Hidayah Taufiqiyah, Ini Penjelasan Kiai Ma'ruf

Dengan suara yang mantap, Johanes mengucapkan syahadat di hadapan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin, Jumat (26/10).

Pemuda asal NTT itu telah cukup lama tinggal dan bekerja di Timika. Kehadiran Kiai Ma'ruf di Masjid Babusalam Timika, dimanfaatkan untuk mengikrarkan tekadnya menjadi penganut agama Islam.

Kiai Ma'ruf berharap Johanes lebih giat belajar agama dan bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Ia juga menyinggung betapa pentingnya hidayah iman.

"Hidayah ini pemberian dari Allah. Dan merupakan nikmat yang besar ketika diberi hidayah masuk agama Islam, seperti yang baru kita saksikan," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf menjelaskan adanaya hidayah *taufiqiyah*, yakni pemahaman agama yang sesuai dengan keinginan Allah.

"Sekarang banyak pemahaman yang beragam, namun jika Allah memberikan hidayah *taufiqiyah* maka kita bisa memahami dan memilih jalan yang benar," ungkapnya.

Pemahaman yang benar, lanjut Kiai Ma'ruf, dipahami sebagai hal yang memang benar. Pemahaman yang salah hendaknya dipahami juga sebagai sesuatu yang salah.

" Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah," tandasnya.

Di Mimika, selain berceramah di Masjid Babusalam, Kiai Ma'ruf juga melakukan lawatan ke Yayasan Pendidikan NU, serta melakukan dialog kebangsaan. **(Sugiarso/Kendi Setiawan)**

Rais Aam PBNU: Pengurus NU Ibarat Sopir

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin memberikan tamsil, pengurus NU ibarat sopir, sedangkan pemiliknya adalah para ulama.

"Para ulama diharapkan membantu pengurus untuk kebesaran NU, bukan hanya *isman* (besar namanya semata), tapi juga *haqiqatan* (memang sungguh-sungguh besar)," kata Kiai Ma'ruf pada Halaqah Alim Ulama se-Wilayah 3 Cirebon, Ciamis, dan Banjar di Pondok Pesantren Mursyidul Falah, Selasa (24/10).

Tugas utama ulama, menurut Kiai Ma'ruf, selain persoalan agama *tafaquh fiddin*, juga tugas *mas'uliyah ummatiyah* yaitu penguatan akidah, juga pemberdayaan ekonomi umat.

"NU itu ciri utamanya adalah *fikrah*, yaitu *Aswaja an-Nahdliyyah*. Kenapa harus ditambahkan an-Nahdliyyah karena ada yang mengaku aswaja namun menolak akidah Asyariyah dan aswaja itu selain *tawassuth* (moderat) juga *tathawwuriyah* (dinamis), namun tetap ber-*manhaj (manhajiyah)*. NU bermazhab *qouli* dan *manhaji*. Tidak tekstualis, juga tidak liberal tetapi *manhajiyan* menurut *madzahibul arba'ah,*" urai Kiai Ma'ruf..

Rais Aam mendorong jamaah dan pengurus NU untuk terus-menerus melakukan dinamisasi pemikiran (*tathwirul fikrah an-nahdliyyah*), dengan mencari solusi atau jalan keluar keagamaan (*makharij al-fiqhiyah*), salah satunya dalam mencari solusi kebangsaan *(makharij al-wathaniyyah).*

"Dengan demikian cara berfikir NU itu solutif atau *makharijiyah* (selalu mencari jalan keluar)," katanya.

Selain *fikrah*, NU juga adalah harakah (gerakan) khususnya dalam rangka perbaikan umat (*islahul ummah*),

salah satunya lewat pemberdayaan ekonomi umat dan perubahan sistem ekonomi nasional.

"Perlu gagasan tentang arus baru ekonomi Indonesia yang lebih mengedapankan penguatan ekonomi umat yang merata dan berkeadilan," tandas Kiai Ma'ruf.**(Das/Kendi Setiawan)**

Kiai Ma'ruf: Belajar Agama Jangan Hanya Melalui Internet

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin berpesan agar masyarakat tidak menerima begitu saja pelajaran agama yang bertebaran di media sosial atau via internet. Pasalnya, pelajaran agama akan rawan sekali penyimpangan bila disampaikan tanpa guru.

Demikian disampaikan Kiai Ma'ruf Amin di hadapan ribuan jamaah NU Taiwan dalam istighotsah dan tabligh akbar di pusat Kota Taiwan, Taipei Main Station, Ahad (15/10).

Hadir dalam acara ini Katib Syuriyah PBNU Asrorun Niam Sholeh, Wakil Kepala Dagang dan Ekonomi Indonesia Siswadi, Sinchung Halal for Taiwan, dan juga Ketua Taiwan Muslim Association Mr Yasin.

"Beragama itu harus melalui guru. NU sudah memberikan panduan keagamaan yang perlu dipegangi. Belajar agama jangan hanya melalui internet. Bisa bahaya. Di sinilah pentingnya berjamaah dan berjam'iyyah. Belajar agama itu dari ulama," jelas Kiai Ma'ruf.

Acara ini disponsori oleh Sinchung Halal for Taiwan, lembaga sertifikasi halal yang menjadi mitra MUI dalam sertifikasi halal di Taiwan. (**Red Alhafiz K**)

Pulang dari Garut, KH Ma'ruf Amin Imbau Pemuda-pemuda Muslim Masuk Banser NU

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menganjurkan anak-anak muda Muslim untuk tidak berdiam diri di tengah gerakan-gerakan keislaman. Kiai Ma'ruf menyindir anak-anak muda yang tidak terlibat dalam gerakan-gerakan positif manapun.

"Kemarin lalu saya ke Garut, menyaksikan Diklatsar Banser. Anggota mereka sudah 3.000. Hebat GP Ansor Garut. Mereka meminta doa kepada saya karena sedang membangun aula untuk beraktivitas," kata Kiai Ma'ruf pada peluncuran Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Gedung PBNU, Jumat (22/9) malam.

Mereka, kata Kiai Ma'ruf, menargetkan anggota Banser hingga berjumlah minimal 5.000 orang.

"Luar biasa saya katakan. Mereka sudah menggarap pemuda hingga tingkat ranting atau desa. Mereka kini sedang bergerak untuk kembali merekrut anggota dan membangun basis di tingkat anak ranting atau tingkat RW."

Kiai Ma'ruf Amin mengapresiasi para pemuda Ansor dan Banser. "Saya datang mereka minta doa, bukan minta duit. Minta doa, bukan minta duit. *Masyaallah*," kata Kiai Ma'ruf.

Ia mendorong para pemuda NU untuk terus bergerak. Menurutnya, pemuda Islam tidak boleh menganggur tanpa terlibat dalam gerakan ke-NUan. Ia kemudian meminjam *i'rab*, semacam bongkar kasus kalimat dalam khazanah ilmu Nahwu.

" Anak muda tidak boleh *mabniyyun alas sukun la mahalla lahu minal i'rab* (tidak boleh kokoh dalam diam sehingga tidak mengambil posisi di tengah pergerakan)," kata Kiai Ma'ruf. (**Alhafiz K**)

Hadiri Diklatsar, Ini Amanat Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin untuk Banser

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyempatkan hadir dalam acara Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Banser Satkorcab ke-15 Kabupaten Garut di Pesantren As-Saadah Kecamatan Limbangan, Garut. Kiai Ma'ruf memberikan amanat kepada 534 Banser yang baru saja diambil sumpah setianya.

"Banser itu bukan galak, tapi santun. Kita mengajak itu harus dengan cara yang santun agar yang diajak sadar dengan sendirinya. Karena itu yang dilakukan oleh Wali Songo," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bagi warga NU memiliki karakter khas yang membedakan dengan kelompok-kelompok Islam yang lain yang juga mengaku Ahlussunnah.

"Bagi warga NU itu Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Karena ada juga yang Ahlussunnah tapi mengkafirkan Imam Al-Asyari. Itu Wahabi namanya. Itu bukan NU," jelasnya.

Menurut Kiai Ma'ruf, Islam Nusantara yang hari ini diwacanakan dan dipegang teguh oleh NU memiliki sifat tidak tekstualis dan juga tidak liberalis.

"NU itu moderat. Tidak tekstualis seperti Wahabi yang gampang membidahkan. Tapi juga tidak liberalis yang menganggap bahwa teks itu tidak penting. Kalau terlalu tekstualis maka umat Islam tidak akan maju. Karena hukum itu justru banyak lahir dari ijtihad," ujarnya.

Kiai Ma'ruf yang juga masih keturunan Syekh Nawawi Banten menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan

dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. NKRI merupakan buah hasil dari perjuangan para ulama.

"Pancasila itu dirumuskan oleh para kiai. NU itu pemilik sah NKRI. Karena menurut sejarawan sebelum ada tentara dan polisi, yang membuat gerakan melawan Belanda itu santri yang mencari ilmu di Makkah. Meskipun kalau NU itu pemilik saham republik ini, tetapi belum menerima dividen," ujar Kiai Ma'ruf yang disambut tepuk tangan hadirin.

Terkait dengan wacana *khilafah islamiyah* yang di Indonesia diwacanakan oleh HTI, Kiai Ma'ruf menganggap sudah tidak relevan.

"Khilafah Islam itu hanya sampai pada Khulafaur Rasyidun. Setelah itu bermacam-macam. Sekarang ada yang kerajaan seperti di Arab Saudi atau republik seperti di Indonesia. Jadi sudah tidak relevan lagi. Kalau kita kembali mengusik dasar negara maka kita akan kembali pada situasi sebelum 1945. Kapan Indonesia majunya," jelasnya. (**Muhammad Salim/Alhafiz K**)

Rais Aam Harap PCINU Belanda Kembangkan Sertifikasi Halal di Eropa

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Belanda menyelenggarakan seminar tentang *Halal Certification: Promoting Sustainability and Fairness in Halal Concept* di Wageningen University & Research, 23 Agustus 2017.

Acara yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen, Wageningen University & Research, dan didukung oleh Atdikbud KBRI Den Haag ini menghadirkan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin sebagai pembicara utama.

"Seminar ini dimaksudkan untuk mendiskusikan perkembangan sertifikasi halal di Indonesia dan di dunia secara umum," ujar Rais Syuriyah PCINU Belanda KH Nur Hasyim. Karena itu, seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai lintas disipilin ilmu, agama, pangan, hukum, dan praktisi halal di Eropa.

KH Ma'ruf Amin dalam ceramahnya menyampaikan materi tentang "*The root of halalan tayyiban concept in Islamic tradition and its contextualisation in the modern world*."

Ia memulai dengan penjelasan tentang sejarah berdirinya lembaga sertifikasi halal di Indonesia yang dimulai sejak 1985. Ketika itu, menurutnya, terjadi keresahan di kalangan Muslim atas isu tercampurnya lemak babi dalam susu. Atas dasar ini, MUI kemudian melakukan sertifikasi halal terhadap makanan obat-obatan, dan kosmetik.

KH Ma'ruf Amin menambahkan bahwa sertifikasi halal MUI tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi di beberapa negara di Asia, Eropa, Australia dan Amerika. Selain itu, MUI memberi pengakuan terhadap lembaga-lembaga halal

di dunia. Tidak kurang dari 50 lembaga halal di dunia memperoleh pengakuan dari MUI.

Sistem halal yang diterapkan MUI mengikuti paham yang paling ketat. Hal ini, menurutnya, didasarkan pada kaidah "halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara itu, ada yang abu-abu (*syubhat*). Ia mencontohkan tentang perbedaan pendapat tentang status kehalalan binatang yang disembelih oleh non-Muslim.

Dalam kasus seperti ini, maka jelas bahwa MUI menganut pendapat yang lebih ketat dan hati-hati, yaitu mengharamkan.

Ia juga mengapresiasi atas terselenggaranya seminar ini dan berharap agar PCINU Belanda dapat mengambil peran untuk mengembangkan kajian sertifikasi halal di Eropa.

Katib Syuriyah PCINU Belanda, M. Latif Fauzi, menyatakan bahwa "penguatan integrasi halal dan *thayyib* merupakan aspek terpenting yang ingin ditekankan dalam seminar ini".

Ketika dikonfirmasi, ketua panitia seminar, Ahmad Sahri, menegaskan, tidak hanya aspek kehalalan saja, tapi keberlanjutkan (*sustainability*) dan kepatuhan pada standar keamananan pangan (*fairness*), menjadi isu penting sertifikasi halal dalam konteks masyarakat Eropa." **(Red: Abdullah Alawi)**

Kiai Ma'ruf Amin: Kemandirian Warisan Santri Ratusan Tahun

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menyebut kemandirian sebagai identitas asli santri. Menurut Kiai Ma'ruf, tema kemandirian ini bukan sesuatu yang baru, tetapi untuk penguatan bahwa santri itu mandiri.

Demikian Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menanggapi tema *Santri Mandiri, NKRI Hebat* yang diusung Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) pada acara peluncuran dan konferensi pers Hari Santri 2017 di lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8) malam.

Santri, menurutnya, dari dulu diajar mandiri. Kemandirian ini juga diperintah oleh Rasulullah, "Kamu jangan menjadi beban orang". Begitu juga dalam salah satu doa kita dengan menyebut *wal afafah*, yakni menjaga diri dari meminta-minta kepada orang.

Oleh karena itu, kata Kiai Ma'ruf, santri biasa hidup mandiri dan diajar hidup sederhana. Santri, juga sudah terbiasa hidup prihatin.

"Santri memang pantang meminta-minta, tapi kalau dikasih pantang menolak. Itu santri itu," katanya diiringi tawa hadirin.

Jadi, kemandirian merupakan watak yang dari dulu diajarkan di pesantren. Kemandirian merupakan suatu keharusan supaya tidak menjadi beban negara dan bangsa. Lebih dari itu, santri harus berkontribusi untuk bangsa dan negara.

"Dari dulu, soal kontribusi itu, dari dulu santri berkontribusi (kepada bangsa dan negara)," katanya.

Tampak hadir pada acara ini Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Waketum PBNU Mochammad Maksum Machfoedz, Ketua PP RMI NU KH Abdul Ghofarrozin dan tamu undangan dari beberapa perwakilan kementrian. (**Husni Sahal/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf Amin: Tanpa Mazhab, Umat Tak Punya Pedoman

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menjelaskan, mereka yang tidak bermazhab itu sama seperti orang yang tidak memiliki patokan. Bahkan, mereka bisa terjerumus pada paham yang menggampangkan atau *tasahhuli*. Sebaliknya, tanpa bermazhab orang bisa terperangkap ke dalam paham yang membuat susah atau *tasyaddudi*.

"Yang tidak bermazhab itu tidak ada patokan," kata Kiai Ma'ruf saat memberikan sambutan pembuka dalam acara *Pelatihan Dai-Daiyah Kader NU 2017* yang diselenggarakan atas kerja sama Lembaga Dakwah PBNU dengan Himpunan Daiyah Muslimat NU (Hidmat NU) di Lantai 8 Gedung PBNU, Senin (29/5).

Menurut Kiai Ma'ruf, NU bukanlah organisasi yang bersifat menggampangkan (*tasahhuli*) dan juga tidak terlalu memberatkan (*tasyaddudi*). NU berpegang pada empat mazhab yang memiliki karakteristik moderat (*tawassuthi*).

"Yaitu di dalam fiqih, empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali," kata Kiai Ma'ruf.

Empat mazhab ini dipilih sebagai anutan NU bukan tanpa sebab. Para ulama empat mazhab ini memiliki buku dan patokan yang jelas tentang bagaimana memahami sebuah teks keagamaan. Pembatasan pada empat mazhab tidak sempit karena uraian yang ada di dalam empat mazhab tersebut cukup untuk menjawab persoalan yang ada.

"Karena empat imam mazhab itu memiliki buku dan patokan-patokan di dalam memahami agama," katanya.

Lebih jauh, ia menerangkan, tidak semua ulama besar yang berpaham Ahlussunnah wal Jama'ah bisa dijadikan

sebagai imam mazhab. "Auzai, Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri tidak boleh diikuti (sebagai imam mazhab) meski mereka Aswaja. Karena mereka tidak ada patokan dan bukunya," jelas Kiai Ma'ruf dengan mengutip pandangan Syekh Nawawi.

Keempat imam mazhab itu dikenal sebagai ulama yang juga produktif dalam menulis. Imam Abu Hanifah mengarang kitab *Fiqhul Akbar*, Imam Malik bin Anas dengan kitab *Al-Muwattha'*, Imam Syafi'i dengan *Ar-Risalah* dan *Al-Umm*, dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan *Al-Musnad*-nya. (**Muchlishon Rochmat/Alhafiz K**)

Kiai Ma’ruf Amin: NU Punya Tanggung Jawab Kebangsaan

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin berpesan kepada pengurus NU di Tasikmalaya untuk menjaga amanah yang dititipkan para pendiri NU, yaitu tanggung jawab keumatan. Selain keumatan, pengurus NU juga bertugas mengawal kebangsaan.

Kiai Ma’ruf menambahkan, ‘Siapa saja yang mengancam negeri ini, dia akan binasa di bawah dulimu’ karena akan berhadapan dengan NU.’

“*Mas’uliyyatul ulama* (tanggung jawab ulama) selain *mas’uliyah ummatiyah* (tanggung jawab keumatan) sekarang ditambah lagi satu, yaitu *mas’uliyah wathaniyah* (tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan),” kata KH Ma’ruf Amin pada tausiyahnya di pelantikan PCNU Kabupaten Tasikmalaya di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Rabu (26/4).

Menurut Kiai Ma’ruf, semua itu merupakan tanggung jawab sejarah karena NU bukan hanya berjasa tap i–menurut Kapolri– NU adalah pendiri bangsa ini.

“Karena NU pendiri, maka NU wajib menjaga dan memelihara negeri ini. Inilah komitmen NU. ‘Siapa saja yang mengancam negeri ini, dia akan binasa di bawah dulimu’ karena dia akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama,” kata Kiai Ma’ruf. (**Husni Mubarok/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf Amin: Tugas Pesantren Juga Berdayakan Umat

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengatakan, pesantren memiliki tugas yang menyeluruh. Pesantren tidak hanya bertanggung jawab memberikan pengajaran tentang keislaman tetapi juga memberdayakan umat.

"Pesantren memiliki tugas paripurna. Tugas utamanya adalah *i'dadul mufaqqihin* dan *rijalul ishlah*," kata Kiai Ma'ruf saat memberikan ceramah dalam acara seminar dan rapat kerja bertemakan *Peran Pesantren untuk Penguatan Ekonomi Umat* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (RMI NU) di Lantai 8 Gedung PBNU Jakarta, Kamis (27/4).

Selain itu, Kiai Ma'ruf menjelaskan, tugas pesantren juga adalah memberdayakan ekonomi umat. Menurutnya, sekarang adalah momentum yang tepat bagi pesantren untuk ikut andil dalam mengembangkan ekonomi Indonesia.

"Sekarang ini momentumnya tepat sekali. Kebijakan pemerintah sangat bagus sekali seperti pendistribusian tanah," jelasnya.

Terkait kebijakan pemerintah itu, Kiai lulusan Pesantren Tebuireng ini mendorong pesantren untuk berbenah dan menyiapkan diri. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai kesempatan tersebut terlewatkan oleh pesantren.

Ia mengaku sudah meminta presiden untuk melibatkan umat Islam dalam pengembangan ekonomi nasional. "Jangan sampai saya *ngerok*. Presiden sudah siap tetapi kita belum siap. Maka kita tidak akan dapat apa-apa," urainya.

Menurut Kiai Ma'ruf, masing-masing pesantren harus bisa memetakan diri terkait dengan model ekonomi seperti

apa yang akan dikembangkan. “Kita harus benar-benar bisa memetakan. Mau bikin gerai, kita bisa kerja sama dengan Carrefour,” jelasnya.

“Kita harus punya inisiatif dan kreatifitas,” lanjut kiai yang juga menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia.

Kiai Ma’ruf menilai, umat Islam adalah bangsa terbesar di negara ini. Jika umatnya kuat maka bangsa Indonesia juga kuat. “Tetapi jika umatnya lemah, maka bangsanya juga lemah. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menguatkan umat,” tukasnya. (**Muchlishon Rochmat/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf Amin: Tanggung Jawab NU Kian Besar

Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin mengatakan tanggung jawab NU kian besar. NU bukan hanya punya tanggung jawab keumatan, tetapi tanggung jawab terhadap sejarah, terhadap kebangsaan dan tanggung jawab terhadap NU itu sendiri serta kepada para ulama.

Menurut Kiai Ma'ruf, kenapa NU bertanggung jawab kepada umat, karena ketika menjelang wafat, Rasul SAW pun hanya mengkhawatirkan umatnya. Rasul tidak mengkhawatirkan istri dan anak-anaknya tapi berpesan bagaimana dengan umatnya.

"Pesan Rasul, *ummatii*, *ummatii*, *ummatii*. Jadi tanggung jawab besar NU bagaimana menjaga dan memelihara umat karena siapa yang mengabdi untuk umat, *Insyaallah* akan ditinggikan derajatnya," kata Kiai Ma'ruf dalam tausiyah pelantikan PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (26/4).

Untuk itu, Kiai Ma'ruf mengingatkan bahwa tugas ulama menyiapkan generasi-generasi ulama juga serta tokoh-tokoh perubahan. Sehingga ulama jangan hanya di pesantren tapi harus terjun di tengah masyarakat.

NU pun, ucap Kiai Ma'ruf, memiliki tanggung jawab juga terhadap sejarah karena pendiri Indonesia adalah NU. Maka NU wajib memelihara dan menjaga NKRI sehingga siapa saja yang mengancam Indonesia akan berhadapan dengan NU.

"Selanjutnya tanggung jawab NU terhadap ulama karena NU organisasinya para ulama. Sehingga ulama NU harus berakidah Ahlussunah wal Jamaah yang an-Nahdiyah jangan Aswaja tapi harakahnya beda. Jangan sampai mengaku NU, berakidah Aswaja tapi harakah (gerakan)-nya Wahabi dan Khawarij," tuturnya.

Setelah memberi tausiyah di Pelantikan, KH Ma'ruf meresmikan Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya di Jalan Badak Paeh Singaparna. Di sana ia meminta Ketua PWNU Jabar, KH Hasan Nuri Hidayatullah untuk menjadikan Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya sebagai gedung kantor percontohan di Jawa Barat. **(Nurjani/Fathoni)**

Tanggung Jawab Ulama Menurut Rais Aam PBNU

Seorang ulama menurut Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin memiliki tanggung jawab yang kompleks. Selain harus membina umat atau bangsa, ulama juga harus memikirkan keselamatan negara dari gangguan-gangguan orang tak bertanggung jawab.

Persoalan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan belakangan ini kian beragam pula, sehingga peran ulama dalam hal ini harus benar-benar maksimal.

Misalnya keberadaan sejumlah kelompok yang mencoba memecah belah bangsa sebab sebuah perbedaan pandangan, ditambah lagi kelompok lain yang hendak merusak tatanan kenegaraan karena sebuah pandangan sistem kenegaraan yang berbeda.

Demikian disampaikan Kiai Ma'ruf saat memberikan tausiyah dalam kegiatan Haul ke-38 salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri di halaman Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Selasa (27/3) lalu.

Tanggung jawab tersebut, kata kiai yang juga ketua umum MUI pusat ini, telah diajarkan Nabi Muhammad SAW pada masanya, bahkan saat mau wafat pun salah satu yang dipikirkan adalah keselamatan umatnya. Karenanya, ulama sebagai pewaris perjuangan nabi sudah seharusnya mencontoh segala ucapan dan sikap para nabi.

"Rasulullah saat mau wafat, salah satu yang diingat adalah umat, jadi umat itu menjadi tanggung jawab ulama karena ulama pewaris para Nabi," ujarnya.

Demikian juga peran NU, organisasi kemasyarakatan bentukan para ulama ini memiliki peran yang sama. "NU

adalah kumpulan para ulama, maka masalah keumatan dan kebangsaan merupakan tanggung jawab NU," imbuh Kiai Ma'ruf.

Namun demikian saat ini tantangan ulama kian besar. "Belakangan ini ada banyak kelompok yang bermacam-macam, baik dari yang berupaya untuk mengubah akidah, syariah juga sistem negara," lanjutnya. **(Syamsul Arifin/ Fathoni)**

Kiai Ma'ruf Amin: Kelompok Ekstrem Banyak Tak Paham soal Sumber Syariah

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyebut gerakan kelompok ekstrem baik ekstrem kanan atau kiri penting untuk diperhatikan. Kelompok ini berpotensi memicu perpecahan antarsesama, sebab secara umum kelompok ini tak bisa menerima terhadap perbedaan khususnya di tanah air, terutama soal syariah.

Kiai Ma'ruf Amin mengimbau agar para ulama dan kiai hendaknya bisa menjaga generasi bangsa dari kelompok-kelompok tersebut. "Para kiai dan ulama harus menjaga dari pikiran-pikiran yang menyimpang," kata Kiai Ma'ruf saat menghadiri haul ke-38 *almaghfurlah* KH Bisri Syansuri di halaman Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Selasa (28/3) malam.

Ia menjelaskan, sikap kelompok ekstrim yang cenderung keras terhadap kelompok yang tidak sepaham ini diakibatkan oleh minimnya pemahaman terhadap syariah. Mereka hanya berpegang teguh pada teks sebagai sumber syariah, dan menyampingkan upaya ijtihad para ulama dalam merespon setiap persoalan aktual.

"Kelompok-kelompok itu hanya kedepankan teks-teks saja, jika persoalan tidak ada *nash*-nya maka dianggap bid'ah. Jika sudah bid'ah maka mereka menganggap tempatnya di neraka dan dimusuhi," jelasnya.

Dengan mengutip pendapat Imam Haramain, Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa syariah kebanyakan diperoleh dari proses ijtihad para ulama atas setiap masalah yang terjadi, dan *nash* tidak dijelaskan secara detail.

"*Imamul Haramain* dalam salah satu kitabnya menjelaskan, sebagian besar syariah itu lahir dari ijtihad bukan dari *nash* yang langsung ditafsirkan secara tekstual," kata Kiai Ma'ruf.

Hal itu menunjukkan bahwa masalah-masalah keumatan terus berkembang hingga saat ini. "Al-Qur'an hanya 30 juz, sementara kejadian-kejadian itu terus berkembang. Makanya itu semua harus disikapi dengan ijtihad-ijtihad," pungkasnya. (**Syamsul Arifin/Alhafiz K**)

Rais Aam PBNU: Pesantren Harus Lahirkan Ulama

Pesantren memiliki peran strategis dalam menyiapkan ulama masa mendatang. Hal ini disampaikan KH Ma'ruf Amin pada puncak haul KH Bisri Syansuri di halaman Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Selasa (28/3) malam.

Menurut Kiai Ma'ruf, KH Bisri Syansuri adalah sosok yang selalu menjaga serta menyiapkan para ahli agama serta tokoh perbaikan. Hal tersebut sejalan dengan pesan Rasulullah SAW bahwa Allah tidak akan pernah mengangkat ilmu dari hati manusia. "Akan tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan memanggil ulama," kata Kiai Ma'ruf.

Kalau kemudian banyak ulama wafat beserta ilmu yang dimiliki, serta tidak ada yang menggantikan maka akan terjadi krisis orang alim. "Akibatnya orang akan mengangkat para pemimpin bodoh," jelasnya. Kalau ditanya sejumlah masalah, akan tetapi tidak didasari pengetahuan, maka mereka akan mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan, lanjutnya.

Karena itu, dalam pandangan Ketua Umum MUI ini, keberadaan ulama harus selalu disiapkan oleh pesantren. "Pesantren adalah tempat *bertafaqquh fiddin*, serta menyiapkan para ulama," tegasnya.

Kiai Bisri, kata Kiai Ma'ruf, adalah sosok yang konsisten menjaga tradisi pesantren tersebut.

Ia juga mengapresiasi gerakan *Ayo Mondok* yang selama ini digagas pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU. "Setidaknya ada kesadaran para orang tua untuk memondokkan anak terbaiknya ke pesantren," ungkapnya.

Sisi lain yang juga menonjol dari Kiai Bisri adalah konsisten menjaga tugas keumatan dan kebangsaan serta

kenegaraan. “Karena ulama itu juga dituntut tanggung jawab keumatan, kebangsaan dan kenegaraan,” urainya.

Hal tersebut sebagaimana diteladankan oleh Rasululah menjelang wafat yang lebih memikirkan masa depan umat. “Ini memberikan pesan bahwa beliau memikirkan umat sepeninggalnya,” katanya. Tanggung jawab umat ini juga menjadi tugas dari NU. (**Ibnu Nawawi/Alhafiz K**)

Teladani Kiai Bisri Syansuri, Rais Aam Ingatkan Agar Tak Gila Jabatan

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan, sifat tawadhu yang dimiliki salah satu tokoh Nahdlatul Ulama *almaghfurlah* Kiai Bisri Syansuri patut dicontoh elemen bangsa, terlebih bagi calon pemimpin bangsa.

Sikap tawadhu Kiai Bisri Syansuri, menurut dia, tercermin saat muktamar NU di Bandung. Pada saat itu Kiai Bisri Syansuri terpilih sebagai Rais Aam. Namun, karena tawadhu Kia Bisri kepada KH Wahab Chasbullah yang pada saat itu juga turut menghadiri muktamar, ia menolak dan melimpahkan jabatan itu kepada Kiai Wahab.

"Tawadhunya beliau (Kiai Bisri Syansuri, red.) luar biasa, meski terpilih menjadi rais aam waktu muktamar, ia tidak mau, selama masih ada KH Wahab Chasbullah sebagai gurunya," jelasnya saat menyampaikan tausiyah pada haul KH Bisri Syansuri di Pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Selasa (28/3) malam.

Ia menambahkan, setelah KH Wahab Chasbullah meninggal saat masih menjabat rais aam, Kiai Bisri Syansuri yang terkenal ahli ilmu fiqih itu maju sebagai penggantinya. Majunya Kiai Bisri Syansuri juga karena amanat umat saat itu.

"Baru ketika KH Wahab Chasbullah sudah tidak menjabat rais aam, beliau mau untuk menjadi rais aam PBNU pengganti beliau (KH Wahab Chasbullah, red)," imbuh kiai yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, dalam konteks kekinian, persoalan jabatan secara umum justru menjadi perebutan yang luar biasa. Bahkan tak jarang kondisi tersebut menjadi akar permasalahan yang memicu terjadinya perpecahan antarsesama.

"Ini luar biasa ketawadhunnya. Patut kita contoh. Kalau sekarang posisi rais aam atau jabatan-jabatan yang lain malah diperebutkan. Saya di posisi rais aam PBNU hasil muktamar NU di Jombang mendapat mandat dari peserta muktamar," ujarnya. **(Syamsul Arifin/Abdullah Alawi)**

Kepada Para Ulama *Khos*, PBNU Selalu Berharap Doa dan Saran

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj atau yang akrab disapa Kiai Said menjelaskan, acara *Silaturahim Nasional Alim Ulama Nusantara* adalah forum khusus untuk para *masyayikh*. Di dalam acara ini, Kiai Said mengharapkan saran, masukan, dan kritik dari para kiai sepuh untuk kemajuan NU.

"Kami minta saran, kritik, masukan dari kiai sepuh," kata Kiai Said saat menyampaikan laporannya di depan para kiai sepuh NU di dalam acara yang digelar di Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, Kamis (16/3).

Selain itu, Kiai Said juga menyampaikan, PBNU sedang melakukan beberapa kerjasama, baik dengan pemerintah maupun swasta. "Dalam kesempatan ini saya sebutkan dua saja. Kerja sama dengan menteri keuangan dan kerja sama dengan BUMN atau Wika," jelasnya.

Kerjasama dengan Wika, imbuh Kiai Said, dengan membangun rumah sakit NU sebanyak tujuh buah. "Setelah tiga puluh tahun, (rumah sakit tersebut) akan menjadi milik NU," tuturnya.

Maka dari itu, Kiai Said memohon kepada para kiai sepuh NU untuk mendoakannya agar dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PBNU bisa berjalan lancar.

Senada dengan Kiai Said, Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin juga menjelaskan, acara ini merupakan forum bagi para kiai sepuh untuk memberikan masukan kepada pengurus PBNU.

"Forum ini kita ingin memperoleh saran, masukan dari kiai sepuh," terangnya.

Pengurus syuriyah, lanjut Kiai Ma'ruf, memiliki beberapa tugas di antaranya adalah menjaga dan menggerakkan pengurus tanfidziyah, menjaga konsistensi agar NU memikul tanggung jawabnya dalam hal keumatan dan kebangsaan, menjaga agar pengurus tanfidziyah memegang erat tata aturan organisasi, baik yang menyangkut ke-NU-an, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan keputusan-keputusan organisasi lainnya.

Kiai Ma'ruf juga berharap agar NU melakukan konsolidasi dan revitalisasi organisasi dalam untuk mengembangkan kaderisasi. "(membangun) madrasah kader NU. Ini yang kita harapkan dalam melaksanakan tugas organisasi," cetusnya.

Untuk mengontrol pengurus tanfidziyah, imbuh Kiai Ma'ruf, pengurus syuriyah melakukan pertemuan satu bulan sekali. "Juga melakukan rapat bersama," tukasnya.

Acara *Silaturahim Nasional Alim Ulama Nusantara* ditutup dengan pembacaan doa oleh Tuan Guru Tirmidzi dan Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. **(Muchlishon Rochmat/ Fathoni)**

Kiai Ma'ruf Amin: Pengurus Struktural NU Itu Hanya Sopir

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menjelaskan, pengurus yang ada di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu hanyalah 'sopir', sedangkan yang memiliki NU itu adalah para kiai yang ada di daerah-daerah karena mereka lah yang mengurusi langsung warga NU.

"Pengurus struktural NU itu hanya sopir, yang punya NU adalah kiai-kiai (kultural yang ada di daerah-daerah)," terang Kiai Ma'ruf.

Hal tersebut disampaikan Kiai Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara *Silaturahim Nasional Alim Ulama Nusantara* di Pondok Pesantren Al Anwar Rembang, Kamis (16/3).

Maka dari itu, kata Kiai Ma'ruf, pengurus struktural NU mengadakan silaturahim ke berbagai daerah untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan NU. "Bukan hanya (silaturahim) ke kiai struktural, tetapi juga ke kiai-kiai kultural," paparnya.

Kiai Ma'ruf juga mengatakan, salah satu tugas NU adalah mengorganisasikan jamaah. "Ada banyak jamaah yang amaliyahnya NU, tapi (mereka) belum NU. Itu yang menjadi tugas kita, mengorganisasikannya," cetus Kiai asal Tanara tersebut.

Sementara itu, Mustasyar PBNU KH Tholhah Hasan berharap agar NU bisa menjadi organisasi yang kuat, dan mampu mempengaruhi bangsa dan umat Islam Indonesia. "Semoga apa yang dikembangkan NU ini bisa kita jaga," harapnya.

Dengan terlaksananya acara ini, ia berpesan agar para kiai bisa saling mengingatkan tugasnya masing-masing. “Semoga pertemuan ini bisa saling mengingatkan tugas-tugas kita masing-masing para ulama,” tutur alumni pesantren Tebuireng ini.

Selain kiai-kiai sepuh NU, acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Rembang Moch Salim dan Kapolres Rembang Sigiarto. **(Muchlishon Rochmat/Fathoni)**

Rais Aam PBNU Gagas Rembuk Nasional, Ini Alasannya

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menilai perlunya diadakan dialog atau rembuk nasional kebangsaan. Hal tersebut penting dilakukan untuk memantapkan hubungan yang sudah lama terjalin dan mengakar di Indonesia.

"Untuk memantapkan *ukhuwah* baik *wathaniyah*, *Islamiyah*, *insaniyah*, bahkan *ukhuwah diniyah*; perlu adanya semacam upaya penegasan komitmen kebangsaan dari komunitas Muslim khususnya, dan ormas Islam," kata Rais Aam, Selasa (28/2) di Jakarta.

Komitmen tersebut diperlukan untuk menegaskan mana ormas Islam yang masih menjaga semangat kebangsaan dan mana yang tidak.

Kiai Ma'ruf menjelaskan rembuk nasional diisi dengan ikrar bersama majelis-majelis agama. Hal ini untuk merawat kemajemukan, kebinekaan, dan toleransi yang bermuara pada pada satu tujuan, yakni merawat keutuhan dan kesatuan bangsa.

Ia mengharapkan dalam rembuk nasional nanti akan dilakukan, setidaknya tiga hal. Pertama adalah mencari solusi kebangsaan dengan menghilangkan sumber konflik.

"Saling pengertian dan memahami dalam rangka mencari solusi kesatuan bangsa. Jadi ini sifatnya solutif," terangnya.

Rembuk juga bersifat antisipatif, yakni mencageh terjadinya kemungkinan gesekan antarelemen bangsa.

Lalu yang ketiga, lanjut Kiai Ma'ruf, rembuk bersifat rekosiliatif, yakni menyatukan kembali potensi dan elemen bangsa agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Untuk menghilangkan (potensi perpecahan) yang bisa terjadi dibangunlah saling pengertian antarkomponen bangsa, dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Rembuk nasional diharapkan dapat mengembalikan elemen bangsa kepada semangat 45 yang telah menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh dan bersatu," pungkasnya. **(Kendi Setiawan/Abdullah Alawi)**

Kiai Ma'ruf Tekankan Pentingnya Semangat Keagamaan dan Kebangsaan

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menekankan di hadapan peserta workshop Lembaga Dakwah PBNU tentang pentingnya membangun umat yang *syakhsyiyah islamiyah nahdliyah*. Yaitu *syahsyiyah* yang punya komitmen keagamaan yang kuat, dan juga punya komitmen kebangsaan dan kenegaraan yang kuat.

Sebab, menurutnya, ada orang yang punya komitmen kebangsan, kemajemukan, toleransi, dan Bhineka Tunggal Ika, tapi sama sekali tidak punya *ghirah islamiyah*. Tapi ada juga, tambahnya, yang punya *ghirah islamiyah* tinggi, tapi tidak mempedulikan kebangsaan dan kenegaraan.

"Padahal sebagai bangsa, kita punya komitmen. Dan NU itu harus punya dua komitmen ini," tegasnya pada acara workshop yang diselenggarakan LD PBNU di Lantai 8, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).

Dalam hal pentingnya komitmen kegamaan, katanya, NU itu *jamiyah diniyah*, yaitu sebagai organisasi kegamaan. Karena itu NU tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip keagamaan; akidah, identitas.

Tapi, lanjutnya, komitmen keagamaan tersebut juga jangan sampai berbenturan dengan kemajemukan, dan kebinekaan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan tentang keberadaan Pancasila dan Islam yang menurutnya satu sama lain tidak bertentangan.

"Pancasila sebagai dasar negara kita dalam berbangsa dan bernegara. Islam adalah agama, akidah kita adalah akidah Islamiyah Ahlusunnah wal Jamaah. Keduannya tidak bertentangan," jelasnya. (**Husni Sahal/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf: Hidup-Mati Nahdliyin Madura, Tetap NU

Warga NU tampak hangat menerima kedatangan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin dalam acara maulid nabi dan temu ulama di Pendapa Sampang, Kamis (9/2). Kehadiran Kiai Ma'ruf ini disambut dengan semboyan yang cukup unik dan dibentangkan sepanjang jalan oleh nahdliyin Madura.

Semboyan berbahasa Madura itu bertuliskan *Mateh Odhik Pangghun NU*. Artinya, hidup mati tetap NU.

Mulanya Kiai Ma'ruf mengernyitkan dahi atas kata-kata itu. Ia terlihat bingung dan sedikit terkejut. Tapi ketika panitia menjelaskan artinya, ia tersenyum dan menegaskan kebanggaannya terhadap warga Madura.

"Saya jadi teringat humor ketika orang Madura ditanya agamanya. Mereka tidak menjawab 'Islam, tapi NU'," ujarnya yang disambut gelak tawa ribuan hadirin.

Menurutnya, slogan itu benar adanya. Itu mengingat fanatisme masyarakat Madura terhadap NU cukup tinggi. Pernyataan hidup mati tetap NU dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena hanya NU yang tetap mengakui keanggotaannya meski sudah mati. Sebab, meski seorang Nahdliyin meninggal dunia, dia tetap dikirimi Fatihah dan doa *maghfiroh* secara berjamaah oleh warga NU lainnya," tegasnya.

Karena itu, tegas Kiai Ma'ruf, NU akan terus menjadi organisasi terbesar di dunia maupun di akhirat. Karena sanad keorganisasiannya menyambung terus hingga ke alam kematian. (**Hairul Anam/Alhafiz K**)

Dua Tanggung Jawab Ulama Menurut KH Ma'ruf Amin

Tanggung jawab ulama itu ada dua. Tanggung jawab keumatan, dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Hal tersebut disampikan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin saat mengisi tausiyah pada peringatan hari lahir ke-91 Nahdlatul Ulama (NU) di halaman PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Pertama, menurutnya, tanggung jawab keumatan itu tanggung jawab yang diberikan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ulama sebagai *warasatul anbiya* (pewaris Nabi) memikul tanggung jawab keumatan itu, antara lain dengan menjaga umat dari akidah-akidah yang menyimpang, baik yang tekstualis maupun yang liberalis. Termasuk pula dengan menyediakan pelayanan publik bagi orang-orang yang membutuhkan.

"Oleh karena itu sekarang NU mengembangkan rumah sakit dalam rangka khidmah ke umat, juga mengembangkan pendidikan supaya masyakarat memperoleh akses pendidikan lebih mudah," ujarnya.

Kedua, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan juga merupakan bagian tanggung jawab NU sebagai organisasi terbesar. Yang utama, menjaga negara dari berbagai kemungkinan terjadinya konflik dengan merawat kebinekaan dan hubungan yang toleran.

"Sementara dalam upaya menghindari konflik-konflik di lapangan perlu ada dialog-dialog nasional, untuk menghilangkan kecurigaan, untuk menghilangkan konflik yang bisa terjadi," kata Kiai Ma'ruf.

Hadir dalam peringatan harlah ke-91 NU kali ini Menteri Susi Pudjiastuti, Mensesneg Pratikno, Ketua DPR RI Setyo Novanto, Menristek Dikti M. Nasir, Menpora Imam Nahrawi,

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan sejumlah tokoh lain.

Turut pula memeriahkan acara penampilan grup musik Wali dan dua komika Cak Lontong dan Insan Nur Akbar. **(Husni Sahal/Mahbib)**

Rais Aam PBNU Jenguk KH Hasyim Muzadi

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin turut menjenguk Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam KH Hasyim Muzadi, Jumat (13/1) yang masih terbaring dalam masa pemulihan di Rumah Sakit Lavalette Kota Malang, Jawa Timur.

Didampingi beberapa teman, Kiai Ma'ruf terlihat langsung menyalami Kiai Hasyim setelah memasuki ruangan pemulihan. Sembari menyalami Kiai Hasyim, Kiai Ma'ruf nampak berbincang-bincang.

Dalam kondisi masih terbaring, Kiai Hasyim juga menyambut hangat Kiai Ma'ruf dengan menyalami dan balik menyapa Rais Aam.

Kemudian Kiai Ma'ruf Amin duduk di kursi yang telah disediakan lalu kembali berbincang dengan Kiai Hasyim. Pemandangan dua kiai sepuh ini mendapat respon positif masyarakat melalui perbincangan media sosial.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Kiai Ma'ruf dan Kiai Hasyim terlihat menengadahkan tangan sebagai tanda sedang berdoa. Hal ini diikuti oleh beberapa orang yang saat itu juga ikut menjenguk Kiai Hasyim.

Sebelumnya, Jumat (6/1), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menjalani perawatan intensif di ruang ICU RS Lavalette. Keesokan harinya, Sabtu (7/1) pagi ia keluar dari ruang ICU dan menjalani perawatan biasa.

Selama itu, Ketua Umum PBNU periode 1999-2010 itu mendapat kunjungan dari berbagai orang dan tokoh nasional, termasuk salah satu Ketua PBNU KH Hasib Wahab. Menurut keterangan rumah sakit, Kiai Hasyim sakit karena kegiatan yang padat beberapa hari terkahir sehingga mengalami kelelahan. **(Fathoni)**

Pegang Teguh Khittah NU sebagai Panduan Berorganisasi

Memperteguh Khittah NU 1926 merupakan langkah penting untuk menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di segala lini kehidupan. Langkah ini dilakukan sebagian kiai dan tokoh nasional dalam seminar Refleksi 33 Tahun Khittah NU, Rabu-Kamis (11-12/1) di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.

Ketua Panitia MN. Harisuddin yang juga ditunjuk sebagai juru bicara kegiatan tersebut mengemukakan bahwa Khittah NU adalah panduan, alat ukur dan haluan organisasi bagi pengurus di semua level.

"Dan warga NU dalam menyikapi berbagai permasalahan kekinian yang sangat dinamis dan cepat berubah atau *mutaghayyirat* baik level kebangsaan, keislaman dan keorganisasian," jelas Katib Syuriyah PCNU Jember ini.

Dikatakannya, berbagai permasalahan kebangsaan, keislaman dan keorganisasian harus disikapi sebagai realitas yang dipengaruhi oleh konstelasi global. Karena itu harus disikapi oleh NU dengan menggunakan konsepsi dasar yang ada dalam Khittah NU, lanjutnya di hadapan Menteri Agama RI dan peserta halaqah ulama tersebut.

Ketua panitia seminar ini mengemukakan bahwa Khittah NU merupakan formula untuk menyembuhkan permasalahan yang terjadi di tengah warga NU, baik kebangsaan, keagamaan, dan organisasi.

"Terakhir, memperkuat dan memperbaiki diri perlu dilakukan seluruh warga dan pengurus dalam rangka menciptakan kemandirian NU sebagaimana dimandatkan khittah," pungkas Dosen Pascasarjana IAIN Jember ini.

Hadir beberapa tokoh dalam seminar ini, diantaranya Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim, KH M Hasan Mutawakkil Alallah, KH Nawawi Abdul Jalil (Sidogiri), Wasekjen PBNU KH Abdul Mun'im DZ, KH Afifuddin Muhajir, Menag Lukman Hakim Saifuddin, serta KH Raden Ahmad Azaim Ibrohimy selaku pengasuh pesantren setempat, dan beberapa tokoh lainnya. **(Ibnu Nawawi/Fathoni)**

EKONOMI SYARIAH

Di Depan Wapres JK, Rais Aam Dorong Arus Baru Ekonomi Indonesia

Penguatan ekonomi warga menjadi poin penting dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2017 di Lombok pada 23-25 November 2017. Hal ini tertuang dalam berbagai persoalan di antaranya pemerataan distribusi lahan, mengikis dominasi ritel modern, dan penekanan terhadap kesejahteraan petani.

Mengingat tujuan penguatan ekonomi warga tersebut, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mendorong arus baru ekonomi Indonesia.

"Yaitu ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan konglomerat dan sejumlah pihak," ujar Kiai Ma'ruf Amin saat memberi sambutan pada acara penutupan Munas dan Konbes NU di Pesantren Darul Qur'an Bengkel, Lombok Bara.

Menurut Kiai Ma'ruf, langkah NU sesuai cita-cita para pendiri bangsa untuk terus berpihak pada kemaslahatan umat secara umum.

Ia juga menjelaskan bahwa kiprah NU saat ini telah dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga warga dunia dengan upaya keras menebar Islam moderat untuk mewujudkan perdamaian.

Bagi NU, sambung Rais Aam, tugas NU dalam memperkuat agama lewat dakwah Aswaja sejurus dengan tugas kebangsaan dan kenegaraan bahkan dalam skala global.

"NU meneguhkan Aswaja bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri dengan Islam Nusantaranya," jelasnya.

Ia mengingatkan kepada warga NU bahwa dalam umurnya yang hampir satu abad, NU telah banyak berkiprah

di segala bidang. Gerakan ini harus semakin diperkuat agar di seratus tahuhn kedua, NU mampu *take off* lebih baik lagi. **(Fathoni)**

Kiai Ma'ruf Jelaskan Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan, ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Padahal keduanya memiliki banyak perbedaan prinsip yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Mereka berpendapat, perbedaan di antara keduanya hanya bersifat pelabelan semata seperti yang satu karyawannya berjilbab, sementara yang satu lagi tidak. Yang satu mengucapkan, *Assalamu 'alaikum* dan yang satunya lagi mengatakan selamat pagi kepada nasabah.

Kiai Ma'ruf menjelaskan, ada perbedaan mendasar yang membedakan sebuah bank syariah dan konvensional. "Saya katakan, bedanya (bank syariah dan konvensional) seperti langit ketujuh dan sumur bor," kata Kiai Ma'ruf.

Hal ini disampaikan oleh Kiai Ma'ruf saat menyampaikan pidato kunci dalam acara seminar nasional ekonomi dan keuangan syariah dengan tema *Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia* di Kampus II UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Rabu (17/5).

Perbedaan keduanya, lanjut Kiai Ma'ruf, bisa pada tataran teknis seperti karyawannya berpakaian secara Islami maupun pada tataran yang substansial seperti praktik pengelolaan dana dan proses pengolahannya.

"Karena banyak karakteristiknya yang beda. Beda prosesnya," ucapnya.

Lebih jauh, ia mengumpamakan perbedaan kedua bank itu dengan orang yang berhubungan badan dan melahirkan seorang anak. Menurutnya, jika ada seseorang yang melakukan hubungan badan tanpa menikah terlebih dahulu

dan melahirkan seorang anak tentu berbeda hukum dan status anaknya dengan mereka berhubungan badan dengan proses akad nikah.

"Ada orang kumpul. Yang satu dengan *qabiltu nikahaha* dan yang satu kumpul kebo, lalu keluarlah anak. Ini beda," kata cicit Syekh Nawawi Al-Bantani itu.

Ridha antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah seperti contoh ini tidak menjadikan sesuatu menjadi halal. Karena kalau dengan ridha sesuatu menjadi halal, maka zina akan dianggap halal. Begitupun dengan praktik bank konvensional.

"Ridha itu syarat dalam akad. Tetapi tidak menjadikan sesuatu menjadi halal," kata Kiai Ma'ruf. (**Muchlishon Rochmat/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf Amin: Sikap Intoleran dan Kesenjangan Ekonomi Jadi Tantangan Bangsa Indonesia Kini

Saat hadir dan memberikan tausiyah kebangsaan pada pra-Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 yang diselenggarakan di Lampung, Sabtu (4/11). Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengingatkan dua hal yang saat ini menjadi tantangan kehidupan bangsa Indonesia.

Yang *pertama*, menurutnya, adalah radikalisme dan sikap intoleran yang disebarkan oleh kaum takfiri. Kelompok yang sering menyalahkan dan mengafirkan orang selain golongannya ini bersumber pada pemahaman yang tektualis terhadap sumber-sumber *nash* agama.

"Syariat agama lebih banyak berasal dari ijtihad dari pada *nash* karena perubahan zaman maka perlu terus ada ijtihad dari para ulama sepanjang waktu," tegasnya pada acara yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandarlampung.

Ia mengatakan pula bahwa pemahaman statis pada teks tanpa melihat konteks realita zaman bukan merupakan karakteristik Islam khususnya di Indonesia.

Oleh karenanya dalam munas dan konbes kali ini akan dibahas dan dirumuskan beberapa hal terkait radikalisme melalui kontraradikalisme dan deradikalisme.

"NU bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Dulu NU melawan penjajah, sekarang jihad NU melawan radikalisme dan Intoleran. Ini komitmen NU terhadap bangsa dan negara. Islam di Indonesia adalah Islam yang *welcome*, Islam yang moderat," tegas Kiai Ma'ruf.

Sikap menyejukkan inilah yang membuat Islam di Indonesia dan NU khususnya banyak diterima di level internasional. Dunia Internasional melihat Islam di Indonesia penuh kedamaian dengan fakta banyak sekali perbedaan keyakinan antarmasyarakat yang dapat bersanding dan hidup dengan damai.

Tantangan yang *kedua*, menurutnya, adalah kesenjangan ekonomi yang sangat nampak di Indonesia. Menurutnya, hal ini dikarenakan pola pengembangan dan kebijakan ekonomi terdahulu yang memberikan peluang lebih banyak kepada yang kuat. Hal ini tidak akan terjadi jika pemberdayaan ekonomi dimulai dari bawah.

"Ada upaya pemerintah untuk mengikis kesenjangan ekonomi dengan redistribusi aset dan kemitraan," katanya seraya memberikan contoh melalui program pemerintah berupa pendirian lembaga keuangan mikro berbasis pesantren. (**Muhammad Faizin/Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf Amin: Gerakan Nyata Pertanian Lebih Mulia Dibanding Aksi-aksi Jalanan

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menyatakan pentingnya gerakan nyata pengembangan perekonomian umat. Ia mengapresiasi budidaya jagung di Lamongan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat di bawah.

Terkait aksi 299, Kiai Ma'ruf yang juga Ketua Umum MUI menyatakan bahwa aksi serupa tak lagi diperlukan.

Menurutnya, umat Islam lebih membutuhkan aksi nyata di ranah pengembangan ekonomi. Umat membutuhkan berbagai prakarsa multipihak untuk perbaikan taraf hidup mereka.

Kiai Ma'ruf mengapresiasi langkah Pemkab Lamongan, Asosiasi Tani Nelayan Andalan, juga Asosiasi Petani Jagung Indonesia bersama-sama para petani di Lamongan yang mampu meningkatkan hasil jagung mereka hingga

300 persen bila dibandingkan masa panen sebelumnya. Inisiatif demikian, tambahnya, lebih mulia ketimbang aksi-aksi yang justru berpotensi memicu kegaduhan, kata Kiai Ma'ruf yang menghadiri Panen Raya Jagung Musim Kemarau 2017 di Desa Kendali Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Jumat (29/9). (**Red: Alhafiz K**)

Kiai Ma'ruf: Kalah Saing dari Toko Swalayan, Santri Harus Perkuat Warung-warung di Kampung

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyebut pemberdayaan ekonomi umat sebagai salah satu tugas utama kalangan santri masa kini. Pasalnya, sekarang ini ekonomi umat mulai melemah. Hal ini ditandai dengan berjatuhannya warung-warung kecil milik warga.

Demikian disampaikan Kiai Ma'ruf Amin pada acara peluncuran dan konferensi pers Hari Santri 2017 di lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Menurutnya, banyak warung kecil mulai kalah bersaing dengan minimarket. "Ini yang harus kita pahami. Jadi harus ada penguatan (menjaga negara) dan pemberdayaan (ekonomi)," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai yang beberapa bulan lalu dianugerahi gelar guru besar bidang ilmu ekonomi muamalah syariah ini sempat melontarkan gagasan tentang pemberdayaan ekonomi umat.

Ia menyebutnya dengan 'arus baru ekonomi Indonesia', yaitu membangun ekonomi dari umat dengan pusat pembangunannya dari pesantren-pesantren.

"Karena itu pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat," tegasnya. (**Husni Sahal/Alhafiz K**)

KH Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah Bawa Keadilan Ekonomi

Ekonomi syariah yang dibangun di atas sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, diyakini lebih membawa keadilan ekonomi. Sistem ini, diyakini dapat menjawab kebutuhan berekspresi dalam berekonomi juga dapat menjawab sisi kebutuhan spiritualnya.

Demikian disampaikan oleh Rais Aam PBNU saat pidato pengukuhan guru besar Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Malang, Rabu (24/5). Hadir dalam pengukuhan tersebut Presiden Joko Widodo

Dijelaskan oleh Kiai Ma'ruf Amin yang juga ketua umum MUI ini bahwa upaya untuk terus menggelindingkan dan memperbesar sektor ekonomi syariah di Indonesia tidaklah mudah dan tidak murah. Upaya perintisan dan pemantapan fondasi sudah dilakukan dengan baik.

"Sektor ekonomi syariah sudah memiliki pijakan kuat, baik dari sisi regulasi, fatwa terkait produk, jasa dan akad, infrastruktur lembaga keuangan dan bisnis syariah, pemenuhan sumber daya insani, dan masyarakat madani yang mengadvokasi akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah," jelas Kiai Ma'ruf.

Sejumlah kendala dan hambatan yang selama ini menjadi penghambat tumbuh kembangnya ekonomi syariah berangsur-angsur sudah mulai dikikis. "Misalnya kendala permodalan, kita terus mendorong pemerintah untuk masuk lebih jauh ke sektor ekonomi syariah, misalnya dengan menambah dan memperbesar porsi BUMN untuk diubah dengan sistem syariah."

Sukuk yang dikeluarkan oleh negara yang dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan di negeri ini dapat menjadi acuan kisah sukses bahwa masyarakat

akan semakin percaya diri kalau negara mau menjamin dan serius menggarap sektor ekonomi syariah. Sukuk negara di Indonesia saat ini menjadi yang terbesar di dunia.

"Hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa jika pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakannya terhadap sektor keuangan dan bisnis syariah, maka akan dapat mengikis kendala kepercayaan yang selama ini masih menjadi hambatan dalam mengakselerasi tumbuh-kembangnya ekonomi syariah di negeri ini," tegasnya.

Kendala lainnya berupa belum kompetitifnya lembaga keuangan dan bisnis syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kendala ini juga mulai terurai. Meskipun kemudahan yang diberikan lembaga keuangan konvensional masih belum tertandingi, namun langkah-langkah yang disusun oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan LBS (Lembaga Bisnis Syariah) sudah mulai mengikis kesenjangan tersebut.

"Fasilitas dan kemudahan yang diberikan LKS dan LBS agar lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan kepada nasabah saat ini sudah mulai tertata dengan baik," imbuhnya.

Kendala lainnya terkait sumber daya insani yang mumpuni, yang bukan hanya terampil dan cakap terhadap teknis ekonomi tapi juga menguasai dan memahami prinsip-prinsip normatif ekonomi syariah, juga sudah mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Peran perguruan tinggi dan universitas sangat penting untuk memenuhi kebutuhan SDM dimaksud.

Kendala terkait dengan peraturan perundangan yang selama ini menjadi batu sandungan semakin bisa diminimalisir seiring dengan mulai tumbuhnya kesungguhan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang sama bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Pemerintah terus didorong untuk semakin menampakkan keberpihakannya

pada sektor ekonomi syariah ini, sehingga dapat menciptakan iklim berinvestasi yang menguntungkan dalam sektor keuangan dan bisnis syariah.

Diakuinya, pemerintah telah mulai menunjukkan kesungguhannya dalam upaya percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi syariah ini. Pemerintah telah intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut.

"Kami tahu upaya tersebut telah dilakukan karena sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan senantiasa mengikutsertakan dan berkoordinasi dengan kami di Majelis Ulama Indonesia. Sebuah langkah yang sangat layak untuk mendapatkan apresiasi."

Hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan dapat melahirkan era baru dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang langsung diketuai oleh Presiden diharapkan dapat mengurai hambatan kebijakan dan kepercayaan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.**(Mukafi Niam)**

Ekonomi Indonesia Tak Boleh Ditopang oleh Segelintir Konglomerat

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi Indonesia yang selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan *top-down* atau dari atas ke bawah, di waktu mendatang harus memperbesar pendekatan dari bawah ke atas *(bottom-up)*. Ekonomi syariah merupakan salah satu alternatif solusi atas ketidakadilan ini.

"Ke depan ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat," katanya dalam pidato pengukuhan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini, di Universitas Islam Negeri Malang, Rabu (24/5).

Dikatakan oleh Kiai Ma'ruf, apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka dapat dipastikan Indonesia menjadi pasar dan pemain ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai prospek cerah, karena selain Indonesia menjadi pasar potensial karena jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

Kiai Ma'ruf menceritakan sejarah perkembangan bank syariah yang pertama didirikan tahun 1991. Bank tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil lokakarya MUI pada tahun sebelumnya. Satu tahun setelah berdirinya bank syariah pertama tersebut lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memuat aturan tentang telah dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang disebut dengan istilah bagi hasil.

Upaya untuk membuat regulasi perbankan syariah terus dilakukan. Pada tahun yang sama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara 1992/119, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaga Negara Nomor 3505). Dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 pasal 1 tersebut, ditetapkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, (ayat 1) yang dibentuk atas dasar konsultasi dengan ulama (ayat 2), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2).

Enam tahun setelahnya terbit UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara jelas di dalamnya mengakomodasi *dual banking system* di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Hubungan baik yang terjalin antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengadopsi dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan fatwa ke dalam peraturan resmi negara telah berlangsung dengan baik di sektor perbankan.

Hal yang sama juga terjadi di sektor lain; seperti sektor asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. Pada tahun 2003 MUI merilis fatwa tentang keharaman bunga bank, karena dinilai sama dengan riba.

"Efek berantai setelah dikeluarkannya fatwa tersebut segera terasakan setelahnya. Hal ini bisa dilihat dari ditetapkannya bagian khusus di lembaga regulator yang menangani masalah ekonomi syariah, baik di Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah yang khusus menangani perbankan syariah, maupun di Departemen Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, Bapepam-LK, Biro Asuransi Syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kesemuanya saat ini disatuatapkan di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

Fatwa tersebut juga mempunyai pengaruh kuat terhadap semakin berkembangnya industri keuangan dan bisnis syariah. Hal itu bisa dibuktikan melalui fakta statistik yang ada. Pada rentang tahun 1990 sampai dengan 1998 hanya ada satu bank syariah.

Pada rentang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 lahir lima bank syariah. Sedangkan setelah fatwa keharaman bunga bank dikeluarkan pada tahun 2003, semakin banyak muncul bank syariah, baik yang berupa Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah. Hal yang serupa juga terjadi di sektor non-bank; banyak lahir asuransi syariah, *multi-finance* syariah, pasar modal syariah, dan lembaga bisnis syariah lainnya.

Hal itu semakin dikukuhkan dengan lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kondisi ini semakin menunjukkan ada hubungan yang kuat sekali antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dinamika tumbuh kembang sektor ekonomi syariah di Indonesia.

"Para ulama di DSN-MUI sangat bertanggung jawab dan percaya diri, bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dikeluarkan berdasarkan aturan dan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam syariah Islamiyah.Memang agak sulit memahami fatwa-fatwa DSN-MUI hanya dengan menggunakan keilmuan standar. Karena banyak dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang mempergunakan solusi hukum Islam (*makharij fiqhiyah*) sebagai landasannya," tegasnya. **(Mukafi Niam)**

Kiai Ma'ruf Amin Dorong Perkembangan Potensi Ekonomi Umat

Di tengah berbagai polemik kebangsaan yang muncul belakangan ini, Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengingatkan para pengurus NU dan para kiai untuk turut berperan dalam menggerakkan ekonomi umat.

Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf dalam Pelantikan dan Peresmian Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (6/4).

"Kini saatnya para kiai menggerakkan ekonomi umat. Mari Bung, rebut kembali! Ekonomi umat ini kita gerakkan, dengan menegakkan prinsip *at-ta'awun*, yaitu prinsip saling membantu. Yang ekonominya kuat harus membantu yang lemah. Membantu dengan tanpa harus mengambil untung. Untungnya berikan semua kepada umat. Nanti ketika gerakan ini berjalan, semua akan memperoleh manfaatnya," kata Kiai Ma'ruf.

Prinsip *at-ta'awun* itu, menurut Rais Aam, bisa dimulai melalui program kemitraan. Dengan melibatkan atau membuat sendiri waralaba yang berjejaring ke seluruh pelosok negeri. Terkait hal ini, negara dan para pengusaha di tingkat nasional maupun pemda bisa dilibatkan. Karena gerakan ekonomi umat itu,akan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Kiai Ma'ruf juga mendorong para pengurus NU di semua tingkatan untuk tak segan bermitra dengan pengusaha dan pemerintah. Asalkan, kemitraan itu bermaslahat dan terasa manfaatnya oleh umat. NU, kata Kiai Ma'ruf, bertanggung jawab dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena mayoritas warga NU adalah dari kalangan *mustadh'afin*. (**Malik/Alhafiz K**)

Rais Aam Sampaikan Kuliah Ekonomi Syariah Kontemporer di UIN Malang

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menyampaikan kuliah umum terkait ekonomi syariah kontemporer di aula rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim, Jalan Gajayana Malang, Jawa Timur, Rabu (12/4) pagi.

Kiai Ma'ruf menjelaskan detil konsep perekonomian syariah di Indonesia berikut dinamika praktiknya sejak awal 1990an.

Dalam ceramahnya Kiai Ma'ruf menyatakan bahwa ekonomi syariah sudah masuk dalam sistem perekonomian nasional. Secara legal undang-undang telah mengakui praktik perekonomian syariah.

"Ekonomi Syariah masuk dalam sistem nasional. Kita mengenal dua sistem, syariah dan konvensional. Ekonomi syariah merupakan gabungan antara inovasi manusia dan nilai-nilai ilahiyah," kata Kiai Ma'ruf di hadapan ratusan mahasiswa UIN Malang.

Sementara Rektor UIN Malang H Mudjia Rahardjo menyambut gembira kedatangan Kiai Ma'ruf. Di hadapan para hadirin H Mudjia menyampaikan bahwa pihak rektorat sengaja mendatangkan tokoh-tokoh bangsa untuk menyampaikan gagasan-gagasannya di hadapan mahasiswa. Tokoh-tokoh bangsa ini merupakan pembimbing masyarakat.

Ia berharap semua alumni UIN Malang dapat menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing.

"Di hadapan kita ini sudah berdiri pakar perekonomian syariah KH Ma'ruf Amin. Kita akan mendengarkan pemaparan beliau," tandasnya. **(Alhafiz K)**